



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026**

**DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA PERSANDIAN  
DAN STATISTIK  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kekhadirat Allah, Swt, karena atas limpahan nikmatnyalah sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan/ isu strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Dokumen Renstra tahun 2021 - 2026 ini memuat Tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas, dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 – 2026 dengan memfokuskan pembangunan pada pemerataan infrastruktur TIK disemua wilayah, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik, sehingga pemerintahan yang partisipatif, informatif, efektif, efisien, dan transparan dapat terwujud.

Kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Semoga Renstra ini dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan Iptek, dan tantangan pembangunan ke depan yang dinamis.

Sangatta, 2021

Kepala Dinas

**Ery Mulyadi, SP., MM.**  
Nip. 19770427 200112 1 003



DAFTAR ISI

|                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| KATA PENGANTAR .....                                                                      | i      |
| DAFTAR ISI .....                                                                          | ii     |
| DAFTAR TABEL.....                                                                         | iii    |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                        | iv     |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                   | I-1    |
| 1.1. Latar Belakang.....                                                                  | I-1    |
| 1.2. Landasan Hukum.....                                                                  | I-2    |
| 1.3. Maksud Dan Tujuan .....                                                              | I-4    |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                                          | I-5    |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                |        |
| PERSANDIAN DAN STATISTIK.....                                                             | II-1   |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....                          | II-1   |
| 2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah .....                                                     | II-11  |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                                               | II-17  |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN                         |        |
| INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK.....                                                 | III-1  |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi     |        |
| dan Informatika Persandian dan Statistik .....                                            | III-1  |
| 3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... | III-9  |
| 3.3 Telahaan Rencana Strategis K/L dan Renstra .....                                      | III-16 |
| 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....       | III-20 |
| 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis .....                                                   | III-21 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....                                                            | IV-1   |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian       |        |
| dan Statistik .....                                                                       | IV-1   |
| BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....                                                         | V-1    |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF .....                       | VI-1   |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....                                        | VII-1  |
| BAB VIII PENUTUP .....                                                                    | VIII-1 |

## DAFTAR TABEL

|              |                                                                                                                                                                                                                              |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2.1    | Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....                                                                                                                                                                       | II-11  |
| Tabel 2.2    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....                                                                                                                                                                        | II-12  |
| Tabel 2.3    | Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional .....                                                                                                                                                                               | II-12  |
| Tabel 2.4    | Komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Berdasarkan Pendidikan ...                                                                                                                                                    | II-13  |
| Tabel 2.5    | Komposisi Non PNS (TK2D ) pada Unit Kerja berdasarkan Pendidikan .....                                                                                                                                                       | II-14  |
| Tabel 1.6    | Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Tahun 2020 .....                                                                                                                                                                 | II-15  |
| Tabel T-C.23 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 – 2021 .....                                                                                         | II-18  |
| Tabel T-C.24 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Infoamtika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur.....                                                                                               | II-22  |
| Tabel 2.4    | Keterkaitan sasaran strategis pada Renstra K/L, Renstra Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur.....                                                   | II-28  |
| Tabel 3.1    | Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD tahun 2021 – 2026.....                                                                                                            | III-6  |
| Tabel 3.2    | Keterkaitan Sasaran strategis dalam RPJMD Kab. Kutai Timur dengan tugas pokok dan fungsi setiap bidang pada Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Faktor penghambat dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala | III-10 |
| Tabel 3.3    | Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026.....                                                                                                                                                              | III-12 |
| Tabel 3.4    | Identifikasi keterkaitan antara permasalahan OPD dengan ketercapaian sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika.                                                                                  | III-14 |
| Tabel 3.5    | Identifikasi keterkaitan antara permasalahan OPD dengan ketercapaian sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi kalimantan Timur.....                                                         | III-17 |
|              | IFAS (Internal Strategic Factor Analysis Summary) .....                                                                                                                                                                      | III-19 |
| Tabel 3.6    | EFAS (External Strategic Factor Analysis Summary) .....                                                                                                                                                                      | III-23 |
| Tabel 3.7    | Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Dan                                                                                                                                                            |        |
| Tabel T-C.25 | Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 – 2026 .....                                                                                                                                           | IV-3   |
| Tabel 5.1    | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....                                                                                                                                                                                | V-2    |
| Tabel 6.1    | Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Kutai Timur Tahun 2021 – 2026.....                      | VI-4   |
| Tabel T-C.28 | Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.....                                                                | VII-2  |

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik ..... II-10

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan teknis operasional selama 5 (lima) tahun yang berpedoman pada RPJMD Kab. Kutai Timur. Penyusunan Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 dalam rangka mewujudkan target indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kab. Kutai Timur Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan urusan masing-masing OPD.

Pada tahap penyusunan rancangan awal awal renstra, dilakukan bersamaan dengan penyusunan ranwal RPJMD yang mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam ranwal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan serta program dan pagu indikatif dalam ranwal RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Renstra Tahun 2016–2021 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2021–2026 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026
2. Renstra Tahun 2021 – 2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur;
3. Renstra Tahun 2021–2026 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum menjadi acuan kegiatan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 – 2035
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Kutai Timur Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Kutai Timur.
22. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus sebagai acuan kesesuaian dalam menetapkan program/kegiatan/Sub. Kegiatan, sasaran strategis sekaligus dapat menjadi pedoman bagi arah kebijakan keuangan selama 5 tahun.

Adapun tujuan penyusunan renstra adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 5 tahun yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur (RPJMD 2021-2026).
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 5 tahun oleh OPD.

3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah /kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adapun sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan,** menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
- BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur,** menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur.
- BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur,** mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur.
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran,** berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur.

- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan,** berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur dalam dua tahun mendatang.
- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan,** mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** mengemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.
- Bab VIII. Penutup,** Berisi ringkasan serta langkah langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika persandian dan statistik menjadi kewenangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika persandian dan statistik Kabupaten Kutai Timur dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan ditanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, susunan organisasi, Tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur diatur melalui Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016.

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sebagaimana diuraikan dalam bab III, Di dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika persandian dan statistik.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Kutai Timur sebagai berikut:

#### **A. Kepala Dinas**

##### **a. Tugas Pokok**

Menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi, Persandian dan Statistik Publik;
3. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang penyelenggaraan *e-Government*;
4. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Persandian dan Statistik;
5. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

**B. Sekretaris**

a. Tugas Pokok

pokok membantu kepala dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan sarana prasarana.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan laporan serta keuangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum;
3. Kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan;
4. Pembinaan, pengkoordinasikan, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
5. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan kepegawaian dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

### **B.1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan**

#### **a. Tugas**

Melakukan penyusunan dan laporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas serta administrasi keuangan.

#### **b. Fungsi**

1. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

### **B.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

#### **a. Tugas**

Melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, pengelolaan sarana prasarana, administrasi kepegawaian.

#### **b. Fungsi**

1. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

### **C. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

#### **a. Tugas**

Melaksanakan penyusunan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan penyebaran informasi pembangunan daerah serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.



b. Fungsi

1. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

**C.1. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi**

a. Tugas

Melaksanakan kegiatan Pengelolaan informasi dan pemanfaatan media komunikasi secara efektif dalam rangka peningkatan kapasitas komunikasi dan penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat secara timbal balik.

b. Fungsi

1. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
2. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan media komunikasi dan informasi;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
4. Pengolahan dan penyediaan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
5. Pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral, lingkup nasional dan pemerintah daerah; dan
6. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi

**C.2. Seksi Publikasi dan Kemitraan Media**

a. Tugas

Membantu Kepala Bidang dalam melakukan publikasi dan kemitraan dengan media dalam rangka mendukung tugas-tugas di Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah.

b. Fungsi

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang publikasi dan kemitraan media;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang publikasi dan kemitraan media;
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang publikasi dan kemitraan media;
4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang publikasi dan kemitraan media;
5. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang informasi dan komunikasi publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**C.3. Seksi Kelembagaan Informasi dan Penyediaan Informasi Publik**

a. Tugas

Melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan pemberdayaan Kelembagaan Media Komunikasi dan Informasi serta melakukan pembinaan terhadap kelompok komunikasi sosial masyarakat.

b. Fungsi

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan informasi dan penyediaan informasi publik;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan informasi dan penyediaan informasi publik;
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kelembagaan informasi dan penyediaan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kelembagaan informasi dan penyediaan informasi publik;
5. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang informasi dan komunikasi publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **D. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telematika**

### **a. Tugas**

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan infrastruktur teknologi informasi, sistem keamanan informasi, dan pengembangan aplikasi telematika.

### **b. Fungsi**

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang;
2. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang;
4. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang; dan
5. Pelaksanaan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

## **D.1. Seksi Infrastruktur dan Komunikasi Data**

### **a. Tugas**

Melaksanakan kegiatan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur jaringan dan komunikasi data melalui penyelenggaraan data centre, pemeliharaan jaringan, peningkatan kapasitas SDM dalam pengembangan infrastruktur, menginventarisasi perangkat keras dan perangkat lunak, spesifikasi pengadaan komputer dan kerjasama teknik berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya jaringan sistem manajemen dan komunikasi data (telematika) yang integral dan up to date.

### **b. Fungsi**

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; sesuai tugas pokok dan fungsi; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

## **D.2. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan E-Government**

### **a. Tugas**

Melaksanakan kegiatan dibidang pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan telematika, pengembangan aplikasi telematika, pengelolaan nama domain dan sub domain, dan pengintegrasian sistem informasi di lingkup SKPD Kabupaten.

### **b. Fungsi**

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

## **D.3. Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi**

### **a. Tugas**

Membantu Kepala Bidang Infrastruktur TI dan Telematika, dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan telekomunikasi, pengembangan keamanan informasi, layanan keamanan informasi pada sistem E-goverment Pemerintah, pelaksanaan audit TIK.

### **b. Fungsi**

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; sesuai tugas pokok dan fungsi; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

## **E. Bidang Persandian dan Statistik**

### **a. Tugas**

Melaksanakan penyusunan program di bidang Persandian dan pengolahan data statistik, monitoring dan evaluasi dan mendokumentasikan data statistik, penyediaan perangkat persandian, layanan keamanan persandian, dan pengolahan data persandian.

### **b. Fungsi**

1. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

## **E.1. Seksi Pembinaan, Perangkat Sandi dan Keamanan Data**

### **a. Tugas**

Melaksanakan tugas penyediaan perangkat sandi, sistem keamanan sandi, dan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

### **b. Fungsi**

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

## **E.2. Seksi Pengelolaan Data Statistik**

### **a. Tugas**

Melaksanakan tugas di bidang pengolahan data dan statistik.

### **b. Fungsi**

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

## **E.3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Data Statistik**

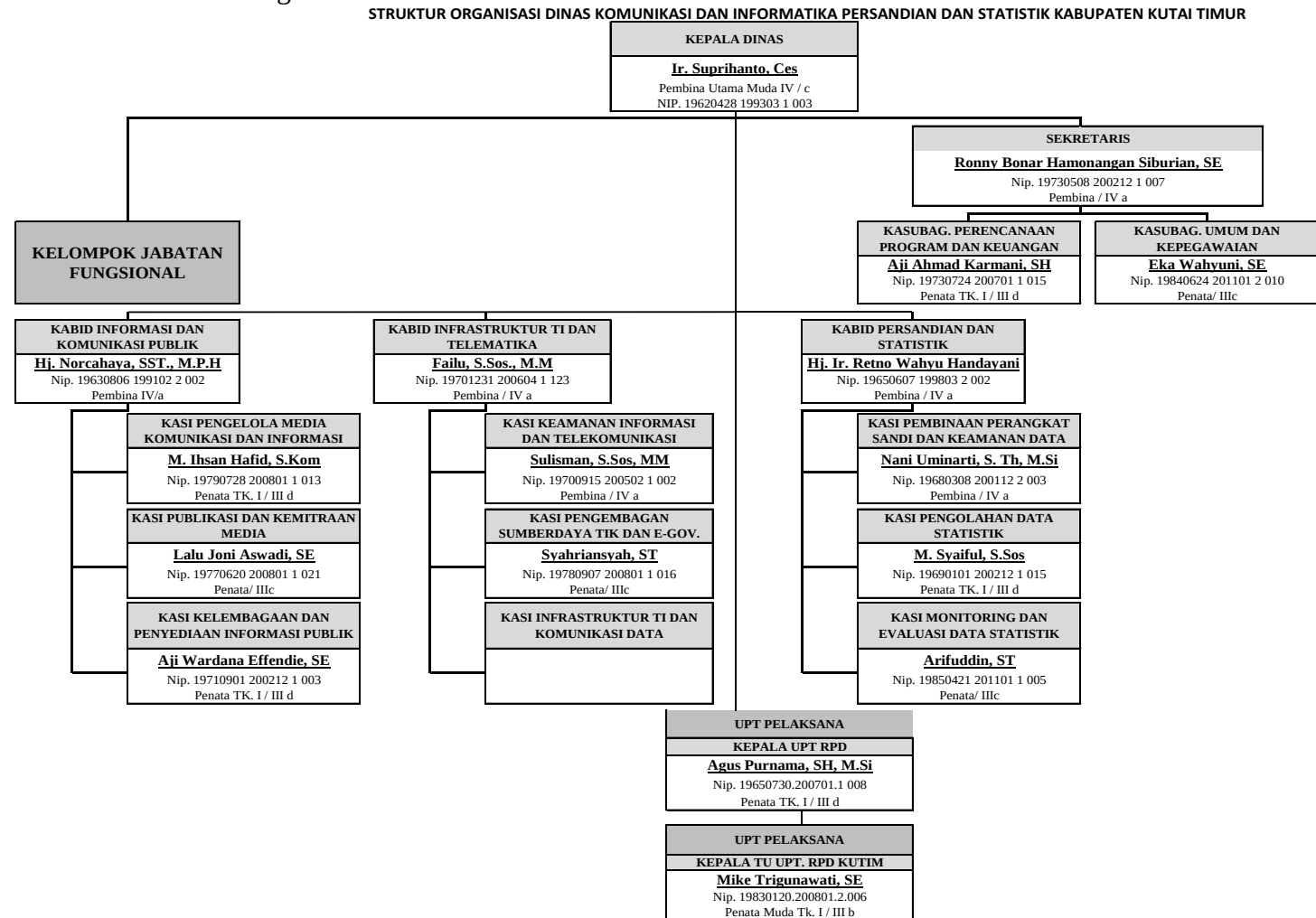
### **a. Tugas**

Melaksanakan tugas di bidang monitoring, evaluasi dan mendokumentasikan data- data statistik.

### **b. Fungsi**

1. penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi;
2. pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
3. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
4. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik



## 2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur didukung oleh 97 orang ASN

Sumberdaya Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan di bidang komunikasi, informatika, serta bidang persandian dan statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur memiliki SDM jumlah sebanyak 45 orang PNS, 52 tenaga kontrak (TK2D) terdiri dari:

**Tabel.2.1**

**Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

| NO. | Eselon        | Jumlah Formasi | Tingkat Pendidikan |                 |                |                | Jumlah          |
|-----|---------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|     |               |                | S2                 | S1              | DIPLOMA        | SLTA           |                 |
| 1   | II            | 1 orang        | 1 orang            | -               | -              | -              | 1 orang         |
| 2   | III           | 3 orang        | 2 orang            | 1 orang         | -              | -              | 3 orang         |
| 3   | IV            | 12 orang       | 3 orang            | 9 orang         | -              | -              | 12 orang        |
| 4   | Non Eselon    | 28 orang       | 1 orang            | 22 orang        | 1 orang        | 4 orang        | 28 orang        |
|     | <b>Jumlah</b> |                | <b>7 orang</b>     | <b>32 orang</b> | <b>1 orang</b> | <b>4 orang</b> | <b>44 orang</b> |



**Tabel. 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

| No. | Unit Kerja                             | Pangkat dan Golongan |   |   |   |              |   |   |   |             |   |   |   | Jumlah   |
|-----|----------------------------------------|----------------------|---|---|---|--------------|---|---|---|-------------|---|---|---|----------|
|     |                                        | Golongan IV          |   |   |   | Golongan III |   |   |   | Golongan II |   |   |   |          |
|     |                                        | a                    | b | c | d | a            | b | c | d | a           | b | c | d |          |
| 1   | Sekretariat                            | -                    | 1 | 1 | - | 3            | 5 | 2 | 1 | -           | - | 1 |   | 14 orang |
| 2   | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 1                    | - | - | - | 3            | 1 | 1 | 3 | -           | - | - | - | 9 orang  |
| 3   | Bidang Infrastruktur TI dan Telematika | 1                    | - | - | - | 3            | 1 | 3 | 2 | -           | - | 1 | - | 11 orang |
| 4   | Bidang Persandian dan Statistik        | 2                    | - | - | - | 1            | - | 1 | 1 | -           | 1 | 1 | 1 | 8 orang  |
| 5   | UPT                                    | -                    | - | - | - | -            | - | 1 | 1 | -           | - | - | - | 2 orang  |
|     | Jumlah                                 | 4                    | 1 | 1 | - | 10           | 7 | 8 | 8 | -           | 1 | 3 | 1 | 44 orang |

**Tabel. 2.3**  
**Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

| Eselon        | Jumlah Formasi  | Tingkat Pendidikan |                 |                |          |          | Jumlah          |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------|-----------------|
|               |                 | S2                 | S1              | DIPLOMA        | SLTA     | SLTP     |                 |
| II            | 1 orang         | 1 orang            | -               | -              | -        | -        | 1 orang         |
| III           | 3 orang         | 2 orang            | 1 orang         | -              | -        | -        | 3 orang         |
| IV            | 12 orang        | 3 orang            | 9 orang         | -              | -        | -        | 12 orang        |
| Fungsional    | -               | -                  | 4 orang         | 1 orang        | -        | -        | 5 orang         |
| <b>Jumlah</b> | <b>16 orang</b> | <b>6 orang</b>     | <b>14 orang</b> | <b>1 orang</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>21 orang</b> |

**Tabel. 2.4**

**Komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Berdasarkan Pendidikan**

| No. | Unit Kerja                             | Tingkat Pendidikan |                 |         |         | Jumlah          |
|-----|----------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|---------|-----------------|
|     |                                        | S2                 | S1              | DIPLOMA | SLTA    |                 |
| 1   | Sekretariat                            | 2 orang            | 11 orang        | -       | 1 orang | 14 orang        |
| 2   | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 1 orang            | 8 orang         | -       | -       | 9 orang         |
| 3   | Bidang Infrastruktur TI dan Telematika | 2 orang            | 8 orang         | 1 orang | -       | 11 orang        |
| 4   | Bidang Persandian dan Statistik        | 1 orang            | 4 orang         | -       | 3 orang | 8 orang         |
| 5   | Kepala UPT RPD                         | 1 orang            | 1 orang         | -       | -       | 2 orang         |
|     | <b>Jumlah</b>                          | <b>7 orang</b>     | <b>32 orang</b> | -       | -       | <b>44 orang</b> |

**Tabel 2.5**  
**Komposisi Non PNS (TK2D ) pada Unit Kerja berdasarkan Pendidikan**

| No.         | Pendidikan (Bidang Studi )                    | Jumlah          |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>I.</b>   | <b>Sekretariat</b>                            |                 |
| 1.          | S1 - Pertanian                                | 1 orang         |
| 2.          | S1 – Ekonomi                                  | 3 orang         |
| 3.          | S1 – Ilmu Komunikasi                          | 1 orang         |
| 4.          | S1 – Pendidikan Geografi                      | 1 orang         |
| 5.          | S1 – Teknologi Pendidikan                     | 1 orang         |
| 6.          | S1 – Psikologi                                | 1 orang         |
| 7.          | SMA-IPA                                       | 2 orang         |
| 8.          | SMA-IPS                                       | 3 orang         |
| 9.          | SMK Administrasi Perkantoran                  | 1 orang         |
| 10          | SMK - Teknik Informatika                      | 1 orang         |
|             | <b>Jumlah</b>                                 | <b>15 orang</b> |
|             |                                               |                 |
| <b>II.</b>  | <b>Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</b> |                 |
| 1.          | S1 - Ilmu Hukum                               | 1 orang         |
| 2.          | S1 – Ilmu Administrasi                        | 1 orang         |
| 3.          | S1 - Kelautan                                 | 1 orang         |
| 4.          | S1 - Ekonomi                                  | 2 orang         |
| 5.          | S1 - Teknik Mesin                             | 1 orang         |
| 6.          | S1 – Administrasi Negara                      | 1 orang         |
| 7.          | SMK - Teknik Konstruksi                       | 1 orang         |
| 8.          | SMK - Teknik Komputer Jaringan                | 1 orang         |
| 9.          | SMA – IPA                                     | 2 orang         |
| 10.         | SMA – IPS                                     | 2 orang         |
|             | <b>Jumlah</b>                                 | <b>13 orang</b> |
| <b>III.</b> | <b>Bidang Infrastruktur TI dan Telematika</b> |                 |
| 1.          | S1 - Teknik Informatika                       | 3 orang         |
| 2.          | S1 - Kelautan                                 | 1 orang         |
| 3.          | S1 - Pendidikan                               | 1 orang         |
| 4.          | S1 - Teknik Elektro Telekomunikasi            | 1 orang         |
| 5.          | D3 - Manajemen Informatika                    | 1 orang         |
| 6.          | D3 - Teknik Informatika                       | 1 orang         |
| 7.          | SMK - Keperawatan                             | 1 orang         |
| 8.          | SMA – IPS                                     | 1 orang         |
|             | <b>Jumlah</b>                                 | <b>10 orang</b> |

| <b>IV.</b> | <b>Bidang Persandiaan dan Statistik</b>         |                |
|------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 1.         | S1 - Pendidikan Agama Islam                     | 1 orang        |
| 2.         | S1 - Pendidikan Biologi                         | 1 orang        |
| 3.         | S1 - Pendidikan Teknologi Bangunan              | 1 orang        |
| 4.         | S1 - Managemen                                  | 1 orang        |
| 5.         | S1 - Ilmu Komunikasi                            | 1 orang        |
| 6.         | S1 – Teknik Informatika                         | 1 orang        |
| 7.         | SMK - Mekanik Otomotif                          | 1 orang        |
| 8.         | SMK - Teknik Komputer                           | 1 orang        |
|            | <b>Jumlah</b>                                   | <b>8 orang</b> |
| <b>No.</b> | <b>Pendidikan (Bidang Studi )</b>               | <b>Jumlah</b>  |
| <b>V.</b>  | <b>Kepala UPT Radio Pemerintah Daerah (RPD)</b> |                |
| 1.         | S1 - Manajemen                                  | 1 orang        |
| 2.         | S1 - Peternakan                                 | 1 orang        |
| 3.         | S1 - Pendidikan Agama Islam                     | 1 orang        |
| 4.         | S1 - Ilmu Administrasi Negara                   | 1 orang        |
| 5.         | D3 - Manajemen                                  | 1 orang        |
| 6.         | SMK – Otomotif                                  | 1 orang        |
| 7.         | SMA – IPS                                       | 1 orang        |
|            | <b>Jumlah</b>                                   | <b>7 Orang</b> |
|            |                                                 |                |

Selain SDM, sumber daya lain yang dapat memberi nilai tambah adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur, baik karena perubahan OPD, Mutasi OPD maupun karena belanja modal berupa:

**Tabel 1.6 Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Tahun 2020**

| No. | Jenis Sarana dan Prasarana | Kondisi |        |       |           | Keterangan |
|-----|----------------------------|---------|--------|-------|-----------|------------|
|     |                            | Lengkap | Kurang | Cukup | Tidak Ada |            |
| 1   | AC                         |         | √      |       |           | 16 Unit    |
| 2   | 'Access Point              |         | √      |       | √         | 5 Unit     |
| 3   | Lemari Besi Sliding        | √       |        |       |           | 11 Unit    |
| 4   | Lemari Kayu (Arsip)        |         | √      |       |           | 1 Unit     |
| 5   | Lemari set                 |         |        | √     |           | 2 Unit     |

|    |                                                        |   |   |   |   |                             |
|----|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------|
| 6  | Baterai 100 ah<br>(baterai untuk BTS)                  |   |   | √ |   | 12 Buah                     |
| 7  | Brand Kas                                              | √ |   |   |   | 1 Unit                      |
| 8  | Handycam                                               | √ |   |   |   | 2 Unit                      |
| 9  | Drone                                                  | √ |   |   |   | 1 Unit                      |
| 10 | HT                                                     | √ |   |   |   | 3 Unit                      |
| 11 | Kamera                                                 | √ |   |   |   | 3 Unit                      |
| 12 | P.C Unit                                               | √ |   |   |   | 11 Unit                     |
| 13 | Laptop                                                 |   | √ |   |   | 6 Unit, 2<br>Kuarang Bagus  |
| 14 | LED TV                                                 |   | √ |   |   | 1 Unit                      |
| 15 | Kursi Kerja                                            |   | √ |   |   | 10 Buah                     |
| 16 | Meja Kursi Kerja<br>(MOUBILER<br>LAINNYA)              |   | √ |   |   | 1 Buah                      |
| 17 | Printer                                                |   | √ |   |   | 19 Unit, 2<br>kuarang bagus |
| 18 | Pengadaan Alat<br>Pembersih (Vacum<br>Cleaner)         |   |   |   | √ | 1 Unit, rusak               |
| 19 | Perangkat Video<br>Conference dan<br>Peralatan Lainnya | √ |   |   |   | 1 Unit                      |
| 20 | Rak Besi                                               |   | √ |   |   | 1 Unit                      |
| 21 | Recorder                                               |   |   | √ |   | 5 Unit                      |
| 22 | Scanner                                                |   |   | √ |   | 3 Unit                      |
| 23 | Router                                                 |   | √ |   |   | 2 Unit                      |
| 24 | Rumah Genset                                           |   | √ |   |   | 1 Buah                      |
| 25 | Server                                                 |   |   | √ |   | 1 Unit                      |
| 26 | Wireless TOA                                           |   | √ |   |   | 1 Unit                      |
| 27 | Unintemuptible<br>Power Supply (UPS)                   |   | √ |   |   | 3 Unit, 1 Rusak             |
| 28 | Switch manageable                                      |   |   |   |   | 2 Unit                      |
| 29 | Tangga Alumunium                                       |   |   |   | √ | 1 Buah, rusak               |
| 30 | Toolkit Cat 6                                          |   | √ |   |   | 2 Unit                      |
| 31 | Sepeda Motor                                           |   | √ |   |   | 1 Unit                      |

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur merupakan nomenklatur baru yang terbentuk Peraturan Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Kutai Timur.

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur, selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 juga pada Standar Pelayanan (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik yang tertuang pada Permen Kominfo No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010 dan Indikator Kunci (PP 6/2008). Selain itu, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur juga mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik**  
**Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 – 2021**

| NO  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD  | Target NSPK | Target IKK | Target Renstra SKPD Tahun ke- |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |      |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |         |        |      |
|-----|-------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|---------|--------|------|
|     |                                                 |             |            | 2017                          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                        | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                         | 2018 | 2019    | 2020   | 2021 |
| (1) | (2)                                             | (3)         | (4)        | (5)                           | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10)                        | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)                         | (16) | (17)    | (18)   | (19) |
|     | <b>Bidang Infrastruktur TI dan Telematika</b>   |             |            |                               |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |         |        |      |
| 1   | Cakupan layanan telekomunikasi                  |             |            | 10%                           | 20%  | 40%  | 60 % | 80 % | na                          | na   | 30 % | 60 % |      | na                           | Na   | 75 %    | 100%   |      |
| 2   | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon |             |            | Na                            | 80%  | 83%  | 85%  | 90%  | na                          | na   | 68   | 80   |      | na                           | na   | 81,93 % | 94,12% |      |
| 3   | Proporsi rumah tangga dengan akses internet     |             |            | Na                            | 25%  | 40%  | 50%  | 60%  | na                          | na   | 25   | 40   |      | na                           | na   | 62,5 %  | 80%    |      |

|   |                                                        |  |  |  |  |                      |             |  |  |  |                      |                                                |  |  |  |       |       |  |
|---|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|-------------|--|--|--|----------------------|------------------------------------------------|--|--|--|-------|-------|--|
| 4 | Terbangunannya Infrastruktur Jaringan TIK yang memadai |  |  |  |  | 4 unit infrastruktur | 1 pekerjaan |  |  |  | 4 unit infrastruktur | - Vsat 3 unit ;<br>- FO 7 OPD:<br>- 1 aplikasi |  |  |  | 100%  | 100 % |  |
| 5 | Jumlah Obyek pengguna TIK yang dibina dan diawasi      |  |  |  |  | 3 provider           | 3 provider  |  |  |  | 3 provider           | 3 provider                                     |  |  |  | 100%  | 100 % |  |
| 6 | Jumlah OPD yang mendapatkan layanan akses internet     |  |  |  |  | 9 opd                | 9 OPD       |  |  |  | 6 opd                | 3 OPD (100 Mbps)                               |  |  |  | 67%   | 30 %  |  |
| 7 | Terbangunnya Tower di Kabupaten Kutai Timur            |  |  |  |  | -                    | 3 tower     |  |  |  | -                    | 1 tower                                        |  |  |  | -     | 33 %  |  |
| 8 | Persentase kegiatan Smart City yang dilaksanakan       |  |  |  |  | 6 kali               |             |  |  |  | 6 kali               |                                                |  |  |  | 100 % |       |  |
|   | <b>Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</b>          |  |  |  |  |                      |             |  |  |  |                      |                                                |  |  |  |       |       |  |



|   |                                                                                            |  |  |    |   |                    |                    |    |    |   |                    |                    |  |    |   |       |        |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|--------------------|--------------------|----|----|---|--------------------|--------------------|--|----|---|-------|--------|--|
| 1 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan   |  |  | Na | 6 | 10                 | 14                 | 18 | na | 0 | 0                  | 11                 |  | na | 0 | 0     | 78,57% |  |
| 2 | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk                                   |  |  |    |   | 3 KIM              | 6 KIM              |    |    |   | -                  | 3 KIM              |  |    |   | -     | 50 %   |  |
| 3 | Jumlah Penyebaran Informasi Publik melalui Website Kutai Timur                             |  |  |    |   | -                  | 365 kali           |    |    |   | -                  | 365 kali           |  |    |   | 100 % | 100 %  |  |
| 4 | Jumlah Informasi Publik Kabupaten Kutai Timur yang disediakan                              |  |  |    |   | 12 jenis informasi | 12 Jenis informasi |    |    |   | 12 jenis informasi | 12 Jenis informasi |  |    |   | 100 % | 100 %  |  |
| 5 | Jumlah pengolahan dan penyediaan informasi Kab. Kutai Timur (PPID)                         |  |  |    |   | 1 webs itee        | 1 tahun (39 OPD)   |    |    |   | 1 webs itee        | 10 OPD             |  |    |   | 100 % | 26 %   |  |
| 6 | Jumlah Penyebaran Informasi publik melalui media cetak, media online, dan media elektronik |  |  |    |   | 365 kali           | 180 kali           |    |    |   | 365 kali           | 180 kali           |  |    |   | 100 % | 100 %  |  |

|   |                                                                            |  |  |     |     |              |                         |     |     |     |              |                         |  |     |     |       |       |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|--------------|-------------------------|-----|-----|-----|--------------|-------------------------|--|-----|-----|-------|-------|--|
| 7 | Jumlah Penyelenggaraan Pemanfaatan teknologi informasi melalui siaranradio |  |  |     |     | 1.080 siaran | 1.080 siaran            |     |     |     | 1.080 siaran | 1.080 siaran            |  |     |     | 100 % | 100 % |  |
|   | <b>Bidang Persandian dan Statistik</b>                                     |  |  |     |     |              |                         |     |     |     |              |                         |  |     |     |       |       |  |
| 1 | Tersedianya Sistem data dan statistic yang terintegrasi                    |  |  | ada | ada | ada          | ada                     | ada | ada | ada | ada          | ada                     |  | ada | ada | ada   | ada   |  |
| 2 | Jumlah dokumen monev data statistik daerah yang disusun                    |  |  |     |     | 1 dokumen    | 1 dokumen               |     |     |     | 1 dokumen    | 1 dokumen               |  |     |     |       |       |  |
| 3 | Jumlah website satu data kutaitimur dan SOP pegelolaan Data Kutai Timur    |  |  |     |     | 1 website    | 1 website dan 1 dokumen |     |     |     | 1 website    | 1 website dan 1 dokumen |  |     |     |       |       |  |
| 4 | Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisasi persandian                      |  |  |     |     | -            | 50 orang                |     |     |     | -            | -                       |  |     |     |       |       |  |

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Infoamtika Persandian dan Statistik**  
**Kabupaten Kutai Timur**

| Uraian                                                                         | Anggaran Pada Tahun Ke- |      |               |               |      | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- |      |             |               |      | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |      |         |         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---------------|---------------|------|-----------------------------------|------|-------------|---------------|------|-----------------------------------------------|------|---------|---------|------|
|                                                                                | 2017                    | 2018 | 2019          | 2020          | 2021 | 2017                              | 2018 | 2019        | 2020          | 2021 | 2017                                          | 2018 | 2019    | 2020    | 2021 |
| (1)                                                                            | (2)                     | (3)  | (4)           | (5)           | (6)  | (7)                               | (8)  | (9)         | (10)          | (11) | (12)                                          | (13) | (14)    | (15)    | (16) |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |                         |      | 699.000.000,- | 951.762.737,- |      |                                   |      | 697.001.389 | 936.143.756,- |      |                                               |      | 99,71 % | 98,36 % |      |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |                         |      | 196.127.000,- | 588.595.000,- |      |                                   |      | 190.969.036 | 585.312.409,- |      |                                               |      | 97,37 % | 99,44 % |      |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                         |      | 308.765.200,- | 175.672.019,- |      |                                   |      | 304.580.062 | 169.192.750,- |      |                                               |      | 98,64 % | 96,31 % |      |

| Uraian                                                     | Anggaran Pada Tahun Ke- |      |                 |                 |      | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- |      |               |                 |      | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |      |         |         |      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------------------------|------|---------------|-----------------|------|-----------------------------------------------|------|---------|---------|------|
|                                                            | 2017                    | 2018 | 2019            | 2020            | 2021 | 2017                              | 2018 | 2019          | 2020            | 2021 | 2017                                          | 2018 | 2019    | 2020    | 2021 |
| (1)                                                        | (2)                     | (3)  | (4)             | (5)             | (6)  | (7)                               | (8)  | (9)           | (10)            | (11) | (12)                                          | (13) | (14)    | (15)    | (16) |
| Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa |                         |      | 4.504.037.440,- | 7.929.649.174,- |      |                                   |      | 4.490.753.099 | 7.269.701.592,- |      |                                               |      | 99,71 % | 91,68 % |      |
| Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi       |                         |      | 140.500.000,-   | 105.000.000,-   |      |                                   |      | 134.420.951   | 104.892.450,-   |      |                                               |      | 95,67 % | 99,89 % |      |
| Program Publikasi dan Kemitraan Media                      |                         |      | 1.728.000.000,- | 507.186.681,-   |      |                                   |      | 1.719.173.003 | 505.654.383,-   |      |                                               |      | 99,49 % | 99,70 % |      |
| Program Monitoring dan Evaluasi Data Statistik             |                         |      | -               | 90.100.000,-    |      |                                   |      | -             | 89.771.250,-    |      |                                               |      |         | 99,64 % |      |
| Program Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi         |                         |      | 50.000.000      |                 |      |                                   |      | 44.353.000    | -               |      |                                               |      | 88,71 % |         |      |

| Uraian                                                         | Anggaran Pada Tahun Ke- |      |                 |                 |      | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- |      |               |                 |      | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |      |         |         |      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------------------------|------|---------------|-----------------|------|-----------------------------------------------|------|---------|---------|------|
|                                                                | 2017                    | 2018 | 2019            | 2020            | 2021 | 2017                              | 2018 | 2019          | 2020            | 2021 | 2017                                          | 2018 | 2019    | 2020    | 2021 |
| (1)                                                            | (2)                     | (3)  | (4)             | (5)             | (6)  | (7)                               | (8)  | (9)           | (10)            | (11) | (12)                                          | (13) | (14)    | (15)    | (16) |
| Program Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan |                         |      | 2.375.072.786,- | 4.986.000.000,- |      |                                   |      | 2.362.050.263 | 4.984.469.050,- |      |                                               |      | 99,45 % | 99,97 % |      |
| Program Sistem Informasi Statistik Daerah                      |                         |      | 470.000.000,-   | 136.460.000,-   |      |                                   |      | 453.286.888   | 134.983.910,-   |      |                                               |      | 96,44 % | 98,92 % |      |
| Program Penyelenggaraan Urusan Persandian                      |                         |      | 50.000.000,-    | 27.864.200,-    |      |                                   |      | 49.869.200    | 27.153.400,-    |      |                                               |      | 99,74 % | 97,45 % |      |

Rasio ralisasi anggaran Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik secara umum baik dengan serapan anggaran rata-rata di atas 90 %, yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran berjalan dengan efektif. Faktor-faktor yang mendukung kinerja pengelolaan anggaran adalah adanya koordinasi dan kerja sama yang baik anatar jajaran Dinas Kominfo dalam pelaksanaan kegiatan dan kualitas SDM yang baik dan kepatuhan terhadap prosedur dan mekanisme pengelolaan anggaran.

**Bidang Infrastruktur TI dan Teklematika :**

**1. Data Perangkat daerah yang terkoneksi jaringan Fiber Optik**

| No. | Keterangan                                      | Satuan | Tahun |      |      |      | Total |
|-----|-------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|-------|
|     |                                                 |        | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 |       |
| 1   | Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan Fiber Optik | Jumlah | -     | 7    | -    | 6    | 13    |

**2. Daftar Desa yang belum terjangkau jaringan Telekomunikasi**

| No. | Kecamatan        | Desa                                                                                                                             | Keterangan |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | Sandaran         | 1. Sandaran<br>2. Manubar<br>3. Tadoan<br>4. Marukangan<br>5. Tanjung Mangkalihat                                                |            |
| 2   | Sangkulirang     | 1. Kerayan<br>2. Saka<br>3. Mandu Pantai Sejahtera<br>4. Kolek<br>5. Perupuk<br>6. Tepian Terap<br>7. Mandu Dalam<br>8. Sempayau |            |
| 3   | Karangan         | 1. Batu Lepoq<br>2. Ba'ay                                                                                                        |            |
| 4   | Sangatta Selatan | 1. Teluk Singkama                                                                                                                |            |
| 5   | Teluk Pandan     | Martadinata                                                                                                                      |            |
| 6   | Bengalon         | 1. Tebangan Lembak                                                                                                               |            |

|    |                |                                                     |  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------|--|
|    |                | 2. Muara Bengalon<br>3. Tepian Langsung             |  |
| 7  | Kaubun         | 1. Bukit Permata<br>2. Pengadan Baru                |  |
| 8  | Kaliorang      | 1. Bukit Harapan<br>2. Bukit Makmur<br>3. Selangkau |  |
| 9  | Batu Ampar     | 1. Mugi Rahayu<br>2. Himba Lestari                  |  |
| 10 | Muara Bengkal  | 1. Mulupan                                          |  |
| 11 | Muara Ancalong | 1. Long Tesak<br>2. Muara Dun                       |  |
| 12 | Busang         | 1. Long Bentuq<br>2. Rantau Sentosa                 |  |
| 13 | Telen          | 1. Lung Melah<br>2. Kernyanyan                      |  |
| 14 | Long Mesangat  | 1. Melan 2. Sika Makmur 3.<br>Segoy Makmur          |  |

Dari data diatas, desa yang masih belum terjangkau jaringan telekomunikasi terdapat di 14 Kecamatan. Desa yang ada di Kecamatan Sangatta Utara, Rantau Pulung, Muara Wahau dan Kongbeng semuanya sudah terjangkau jaringan telekomunikasi.

## **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

### **1. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat**

Pada tahun 2020 telah dibentuk 3 Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM). Dengan adanya KIM ini diharapkan akan menjadi media penyampaian Informasi dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat yang sifatnya G to C ( Government to Citizen). sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Disamping itu persoalan yang ada di

Masyarakat dapat ditangkap langsung oleh pemerintah dan selanjutnya dengan cepat dicarikan solusi dari persoalan tersebut.

## **2. Implementasi Keterbukaan informasi Publik**

Dalam rangka melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi publik dilingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah terbentuk 1 PPID Utama dan 57 PPID Pembantu. PPID Pembantu yaitu PPID yang berada diseluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkup Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari 39 OPD dan 18 PPID Pembantu di Kecamatan. Pada tahun 2020 terdapat 10 OPD yang telah menyampaikan Informasi Publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi dan sebagai bentuk peran aktif dalam mendukung good governance dan open governance di lingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

## **3. Media penyiaran publik local Radio dan Televisi**

Sebagai Upaya untuk mendukung keberhasilan program pembangunan kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik mengelola dua Unit Pengelola Teknis (UPT) yaitu UPT. Radio dan UPT. Televisi yang merupakan media penyiaran di daerah Kab. Kutai Timur yang berperan strategis dalam memberikan kesinambungan informasi, Pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang positif.

### **Bidang Persandian dan Statistik**

#### **- Penerapan Satu data**

Dalam rangka implementasi Satu Data, Diskominfo Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2018 telah menyediakan Portal satu data dengan Sistem Informasi Statistik daerah (SISD) yang berisi data dasar pembangunan daerah Kab. Kutai Timur. Pada Tahun 2019 dilakukan pengembangan system menjadi Portal Satu data kutai Timur dengan alamat situs [www.data.kutaitimurkab.go.id](http://www.data.kutaitimurkab.go.id). Pengembangan SISD menjadi portal satu data adalah dengan menambahkan unsur data sectoral dan integrated managemen data dengan menggunakan alat bantu Comprehensive Knowledge Archive Network



(CKAN) yang terintegrasi dengan portal data nasional. Portal data Kutai Timur ini diharapkan akan menjadi e-database serta dapat menyajikan data dan informasi secara terbuka, cepat dan mudah diakses oleh masyarakat serta dapat menjadi media bagipakai anatar instasni di Pemerintahan Kab. Kutai Timur.

- **Penyelenggaraan urusan persandian untuk pengamanan informasi**

Kegiatan yang telah dilakukan Dinas Kominfo Persandian dan Staistik berkaitan penyelenggaraan urusan persandian adalah koordinasi dan konsultasi dalam rangka implementasi persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah. Selain itu telah dibut kebijakan berupa peraturan bupati tentang penerapan tanda tangan elektronik.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

- Analisis Terhadap Renstra K/L dan Renstra Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur Secara substansi, hubungan Renstra Dinas Kominfo, Persandian dan Staistik Kabupaten Kutai Timur, dengan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Kementrian Kominfo ada pada tujuan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan keapada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Keterkaitan sasaran strategis pada Renstra K/L, Renstra Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur

| Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024                                              | Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur Tahun                                                                  | Diskominfo Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sasaran Strageis:                                                                | Sasaran Strategis:                                                                                          | Sasaran Strategis:                                                                                              |
| <b>SS.01. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau</b> | Terintegrasinya sistem perencanaan dan kerjasama pembangunan tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota | Meningkatnya ketersediaan infrastuktur TIK untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi |
| Jumlah desa mendapatkan layanan seluler 4G di wilayah 3T dan non 3T (kumulatif)  |                                                                                                             | Cakupan layanan telekomunikasi                                                                                  |

|                                                                                                                                                   |  |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
| Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband*28 (kumulatif)                                              |  | Jumlah OPD yang terkoneksi dengan jaringan Fiber Optik |
| Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses fixed broadband terhadap total Rumah Tangga* (kumulatif)                            |  |                                                        |
| Kapasitas penyediaan satelit multifungsi (SATRIA1&2) (Gbps)                                                                                       |  |                                                        |
| Persentase (%) rasio harga layanan jaringan mobile broadband terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)                   |  |                                                        |
| Persentase (%) rasio harga layanan fixed broadband terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan up to 30 Mbps)                                  |  |                                                        |
| <b>SS.02 Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital</b>                                                                        |  |                                                        |
| Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran TV digital* (kumulatif)                                                                               |  |                                                        |
| <b>SS.03 Meningkatnya konektivitas layanan pos</b>                                                                                                |  |                                                        |
| Persentase (%) cakupan layanan pos (kumulatif)                                                                                                    |  |                                                        |
| <b>SS.04 Terwujudnya Konektivitas Next Generation Nasional</b>                                                                                    |  |                                                        |
| Jumlah lokasi yang terkoneksi 5G pada tahap awal implementasi                                                                                     |  |                                                        |
| <b>SS.05 Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika</b> |  |                                                        |
| Jumlah Penambahan spektrum frekuensi radio (kumulatif)                                                                                            |  |                                                        |
| Jumlah Penambahan spektrum frekuensi radio (kumulatif)                                                                                            |  |                                                        |
| Persentase (%) penyelesaian laboratorium balai besar pengujian perangkat telekomunikasi sebagai lab rujukan nasional* (kumulatif)                 |  |                                                        |
| Jumlah dokumen standar teknis sebagai pendukung sertifikasi perangkat pos dan informatika                                                         |  |                                                        |
| Jumlah capaian PNBP bidang pos dan informatika                                                                                                    |  |                                                        |
| Indeks kepuasan publik terhadap layanan publik Kemenkominfo                                                                                       |  |                                                        |

|                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SS.06 Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis</b>                                                                                                              |                                                    | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur TIK untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi |
| Persentase (%) tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis dan kawasan prioritas (kumulatif): a. Pertanian b. Pariwisata c. Logistik d. Maritim e. Pendidikan f. Kesehatan |                                                    | Cakupan layanan telekomunikasi                                                                                   |
| Jumlah UMKM yang scale up dari usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah dengan adopsi teknologi digital* (kumulatif)                                                            |                                                    |                                                                                                                  |
| Jumlah penambahan unicorn (kumulatif)                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                  |
| Jumlah startup digital aktif yang terbentuk (kumulatif)                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                  |
| Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019                                                                                      |                                                    |                                                                                                                  |
| Persentase (%) Implementasi UU PDP (kumulatif)                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                  |
| Persentase (%) ketersediaan riset dan penelitian bidang TIK                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                  |
| <b>SS.07 Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital</b>                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                  |
| Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi bidang TIK (kumulatif)                                                                                                                  |                                                    | Literasi digital untuk aparaturnya dan masyarakat                                                                |
| Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digital                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                  |
| <b>SS.08 Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah</b>                                                                                                                          | Optimalisasi penggunaan aplikasi yang terintegrasi | Terselenggaranya layanan public yang berkualitas berbasis interoperabilitas                                      |
| Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional                                                                                                                                               |                                                    | Tersedianya system data dan statistic yang terintegrasi                                                          |
| Persentase (%) instansi yang memanfaatkan aplikasi generik yang dikembangkan secara multiplatform (kumulatif)                                                                       |                                                    | Persentase OPD yang terkoneksi jaringan Fiber Optik                                                              |
| Persentase (%) instansi yang memanfaatkan aplikasi generik yang dikembangkan secara multiplatform (kumulatif)                                                                       |                                                    |                                                                                                                  |
| <b>SS.09 Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik</b>                                                                                                      |                                                    | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, Efektif,                                                       |

|                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |                                                                                | <b>Transparan dan Akuntabel</b>                                                                   |
| Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (kumulatif) |                                                                                | Persentase OPD yang telah menyampaikan informasi publik                                           |
| <b>SS.10 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>                                                                                           | Optimalisasi Program SPBE untuk pemutakhiran data/informasi pembangunan daerah | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel               |
| Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1- 5)                                                                                                      | Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1- 5)                               |                                                                                                   |
| Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkominfo                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                   |
| Nilai opini laporan keuangan Kemenkominfo menurut kriteria                                                                                            |                                                                                |                                                                                                   |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kemenkominfo                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                   |
| Indeks kompetensi pegawai Kemenkominfo                                                                                                                |                                                                                | Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal khususnya dibidang TIK |

Berdasarkan sasaran strategis kementerian Komunikasi dan Informatika yang ada pada Renstra Kementerian Kominfo tahun 2019 - 2024 ada beberapa hal yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik sebagai berikut :

01. Peningkatan cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau dengan target sasaran :

- Peningkatan jumlah desa yang mendapat layanan 4G di wilayah Non 3 T sebanyak 3435 desa.
- Target 60 % kecamatan diseluruh Indonesia yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband.
- Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses fixed broadband terhadap total Rumah Tangga dengan target 30 % Rumah tangga diseluruh Indonesia.
- Peningkatan kapasitas penyediaan satelit multifungsi (SATRIA1&2) (Gbps) dengan target 300 Gbps.

02 Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital dengan target 85 % populasi penyiaran TV digital.

03 Meningkatnya konektivitas layanan pos dengan target 74 % kecamatan memiliki layanan pos.

04 Terwujudnya Konektivitas Next Generation Nasional dengan milestone target sebagai berikut :

- Tahun 2022 : (satu) regulasi/kebijakan untuk implementasi dan penyelenggaraan 5G,
- Tahun 2023 : 11 (sebelas) lokasi penggelaran infrastruktur dan jaringan 5G di : 6 ibukota provinsi di pulau jawa dan 5 destinasi wisata super prioritas
- Tahun 2024 : 2 (dua) lokasi penggelaran infrastruktur dan jaringan 5G di IKN dan 1 industri manufaktur.

05 Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika

- Jumlah Penambahan spektrum frekuensi radio (kumulatif) dengan target 1310 MHz.
- Jumlah capaian PNPB bidang pos dan informatika dengan target Rp. 24.571.039.152.075,-
- Indeks kepuasan publik terhadap layanan publik Kemenkominfo dengan target nilai indeks diatas 3,5.

06 Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis

- Persentase (%) tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis dan kawasan prioritas (kumulatif): Pertanian, Pariwisata, Logistik, Maritim, Pendidikan, dan Kesehatan dengan target 100 %.
- Jumlah UMKM yang scale up dari usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah dengan adopsi teknologi digital dengan target 33.000 UMKM
- Jumlah penambahan unicorn (kumulatif) dengan target 3 unicorn
- Jumlah startup digital aktif yang terbentuk (kumulatif) dengan target tahun 2024 adalah 150 startup digital.
- Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019 dengan target 95 % PSE.
- Persentase (%) Implementasi UU PDP dengan target 100 % Perlindungan Data Pribadi.

07 Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital

- Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi bidang TIK (kumulatif) 50.000.000 orang.
- Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digital dengan target 72.500 orang

08 Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah

- Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional dengan target 2 Data Center nasional.
- Persentase (%) instansi yang memanfaatkan aplikasi generik yang dikembangkan secara multiplatform 2022 : Pemkab/kot=50% (257 kab/kota), 2023 : Pemkab/kot= 60% (308 kab/kota), dan 2024 : 70% (360 kab/kota) Pemkab/kot.
- Jumlah Kab/Kota di kawasan prioritas (5 kawasan super prioritas dan 1 kawasan IKN) yang mengimplementasi Smart City (kumulatif) tahun 2022-2024 : - Masterplan Smart City pada 50 Kab/Kota (baru) dan Implementasi Smart City pada 63 Kab/Kota di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan 6 kab/kota di kawasan IKN.

09 Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public

- Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah dengan target 75 %.

10 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

- Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1- 5) target 4,1

Berdasarkan uraian tentang sasaran strategis dan target lima tahunan Kementerian Kominfo sebagaimana yang di tuangkan dalam Renstra Kementerian, maka dari hasil analisis ada beberapa hal yang berimplikasi pada peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statisti, sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan jaringan pitalebar yang cepat dan terjangkau dengan target Dasa pada kategori Non 3T, Kecamatan dan Rumah Tangga diseluruh Indonesia akan memberikan peluang peningkatan cakupan jaringan tersebut di wilayah Kab. Kutai Timur.

2. Penggelaran infrastruktur dan jaringan 5G di IKN akan memberikan dampak kepada Kab. Kutai Timur sebagai daerah penyangga IKN.
  3. Peningkatan pemafaatan TIK pada sektor Ekonomi dan Bisnis melalui peningkatan pengelolaan UMKM, Unicorn dan Startup digital.
  4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pada teknologi digital akan mewujudkan masyarakat cerdas dan bijak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
  5. Adanya dukungan digitalisasi pemerintahan akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik, dan mendukung implementasi Smart City.
  6. Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik
  7. Tersedianya data yang akurat, update dan mudah dikases.
  8. Pengamanan data dan informasi
- Analisis terhadap Sasaran Strategis pada Renstra Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur yang berimplikasi pada peluang pengembangan pelayanan dinas Kominfo Persandian, dan Statistik kab Kutai Timur :
1. Peningkatan capaian kinerja pembangunan yang telah direncanakan dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota melalui system pengawasan dan pengendalian yang terintegrasi.
  2. Terintegrasinya aplikasi tata kelola antar pernagkat daerah melalui implementasi SPBE
  3. Mengoptimalkan penerapan SPBE untuk mendukung pengelolaan data/informasi pembangunan daerah

Dalam mendukung implementasi SPBE Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur menetapkan target capaian hingga tahun 2023 dengan nilai indeks SPBE sebesar 3,54.

- Analisis terhadap RTRW yang berimplikasi terhadap pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik.

Dalam RTRW salah satu rencana struktur tata ruang di Kabupaten Kutai timur adalah sistem jaringan telekomunikasi. Sistem jaringan telekomunikasi berupa sistem jaringan kabel dan nirkabel. Sistem jaringan kabel berupa Sentra Telepon Otomat (STO). STO tersebut terpasang di ibu kota Kabupaten Kutai Timur, yakni di Kecamatan Sangatta Utara. Sementara itu, sistem jaringan nirkabel berupa Base Transceiver Station (BTS). BTS merupakan komponen jaringan dari sistem komunikasi mobile yang menerima dan mengirim sinyal.

Hingga tahun 2021 masih terdapat 37 desa/kelurahan yang belum dapat menikmati jaringan telekomunikasi dengan baik atau masih dalam kondisi blank spot. Blank spot adalah kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tercover sinyal telekomunikasi, baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon maupun komunikasi digital seperti jaringan internet.

Penambahan menara komunikasi perlu diprioritaskan pada area blank spot terlebih dahulu kemudian dapat diarahkan di kawasan dengan penduduk yang padat.

Pemanfaatan struktur tata ruang dan wilayah untuk sistem jaringan telekomunikasi akan meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar telekomunikasi, informasi, bisnis dan aktivitas lainnya.

- Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi terhadap pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik.

Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disajikan dalam KLHS RPJMD Kab. Kutai Timur tahun 2021 – 2026 terdapat indikator yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik sebagai berikut :

#### 1. Indikator Penetrasi Akses Tetap Pita Lebar

Akses tetap pita lebar (fixed broadband) adalah akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (fixed) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (backbone) mencapai orde



ratusan Gbps. Akses tetap pita lebar perkotaan sebesar 20 Mbps dan di pedesaan sebesar 10 Mbps. Capaian indikator TPB Penetrasi Akses Tetap Pita Lebar sebagaimana proyeksi akan tercapai pada tahun 2023.

## 2. Indikator Penduduk Terlayani Broadband

Akses bergerak pitalebar (mobile broadband) adalah akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (fixed) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (backbone) mencapai orde ratusan Gbps. Capaian indikator TPB Penduduk Terlayani Broadband sebagaimana proyeksi akan tercapai pada tahun 2023.

## 3. Indikator Proporsi Penduduk Pengguna Internet

Internet menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Internet menjadi indikator kunci yang digunakan oleh pengambil kebijakan untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet. Capaian indikator Proporsi Penduduk Pengguna Internet di Kabupaten Kutai Timur disajikan dalam sebagaimana proyeksi akan tercapai di 2024.

Berdasarkan uraian indikator capaian TPB diatas, maka ketersediaan infrastruktur TIK yang merata diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur menjadi prioritas pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas dasar berupa jaringan Telekomunikasi dan internet.

Peningkatan cakupan layanan telekomunikasi dan internet akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, percepatan tanggap bencana, mendukung pelayanan dasar pada masyarakat.

- Analisis Internal dan Eksternal

Identifikasi factor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja OPD, dilakukan untuk mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

### A. Faktor Internal

- Kekuatan :

1. Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
  2. Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kutai Timur cukup memadai hal ini dapat dilihat dari komposisi golongan, pangkat, jabatan fungsional dan eselonisasi jabatan serta latar belakang pendidikan, sehingga optimalisasi pelayanan kepada masyarakat akan bisa dicapai.
  3. Adanya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja sektor pembangunan yang akan dikembangkan
  4. Adanya kepemimpinan Kepala daerah yang memiliki integritas, kapabilitas, akseptabilitas dan mobilitas yang tinggi, memungkinkan aspirasi yang berkembang lebih cepat diakomodasi, juga memiliki kemampuan membangun Partner Aliansi Strategic dengan berbagai lembaga pemerintahan seperti legislatif, yudikatif dan alim ulama serta ormas, orsospol.
  5. Pemerintah daerah telah memiliki jaringan Fiber Optik mandiri, fasilitas data center (NOC) dan sarana prasaran penunjang lainnya.
  6. Adanya kebijakan pengelolaan informasi public dan media informasi milik pemerintah daerah.
- Kelemahan :
1. Kurangnya kegiatan peningkatan kompetensi Aparatur pemerintah
  2. Regulasi/ peraturan yang mengatur pengembangan TIK, informatika, pos dan telekomunikasi.
  3. Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal.
  4. Sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di OPD
  5. Belum optimalnya pengelolaan data.

## B. Faktor Eksternal

- Tantangan
1. Wilayah Kab. Kutai Timur yang luas menjadi tantangan dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi secara

merata dan proporsional dalam rangka mewujudkan Kutai Timur merdeka signal untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan ekonomi bagi masyarakat.

2. Pengelolaan Website Pemerintah Kutai Timur secara menyeluruh
3. Konektivitas antar OPD
4. Jaminan keamanan sistem informasi
5. Kesenjangan kemampuan teknologi informasi di masyarakat
6. Penyediaan dan penyebaran informasi public
7. Penyediaan data yang akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan

- Peluang

1. Meningkatnya sarana dan prasarana bidang TIK di masyarakat.
2. Dukungan layanan digital akan memicu meningkatnya Ekonomi Masyarakat
3. Meningkatnya bandwidth yang ada, serta terfokusnya pengelolaan bandwidth di Dinas Kominfo sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal.
4. Meningkatnya jumlah pelayanan public yang diselenggarakan secara online
5. Meningkatnya tata kelola wilayah dan daya saing daerah melalui implementasi smart city
6. Penyelenggaraan Statistik sectoral
7. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi

- Ancaman

1. Perubahan kebijakan pemerintah pusat melalui regulasi yang berdampak pada dinamika pembangunan di Kutai Timur
2. Timbulnya permasalahan sosial yang disebabkan oleh rendahnya kualitas pelayanan dasar, menurunnya stabilitas keamanan dan lambatnya transformasi pelayanan publik
3. Keamanan sistem informasi yang dikelola pemerintah.
4. Kebebasan dalam penggunaan media sosial

- Faktor Kunci Keberhasilan :

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang diidentifikasi berdasarkan factor internal dan eksterna adalah :

- a. Adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan public.
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
- c. Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat secara maksimal.
- d. Pemanfaatan TIK untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan public.
- e. Tersedianya data yang akurat dan update untuk terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif.
- f. Terlaksananya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar semua stakeholder dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.
- g. Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERSANDIAN DAN**  
**STATISTIK**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik**

Arus Globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang informasi dan komunikasi membawa dampak perubahan dan pembaharuan terhadap aspek social, budaya, ekonomi, politik dan hankam. Hal ini menyebabkan bidang informasi dan komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Berikut ini beberapa hal terkait aspek komunikasi dan informasi yang akan menjadi persoalan yang dihadapi dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur.

**1. Revolusi Industri 4,0 dan ( Society 5,0)**

Revolusi Industry 4,0 sebagai perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan, penetrasi teknologi yang serba disruptif, menjadikan perubahan semakin cepat, sebagai konsekwensi dari fenomena Internet of Things (IoT), big data, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial. Fenomena disruptsi yang mewarnai perkembangan peradaban Revolusi industry 4.0 yang didukung kemajuan pesat teknologi akan membawa kita pada kondisi transisi revolusi teknologi yang secara fundamental akan megubah cara hidup, bekerja dan relasi organisasi dalam berhubungan satu sama lain. Ketersediaan teknologi tinggi tren otomasi dan pertukaran data di era revolusi industry 4.0 memberikan dampak pada kehidupan manusia yang menimbulkan gejala, ketidakpastian, komplksitas, dan ambigutas ( tekno.tempo.co).

Pada Era Revolusi Industri 4.0 peran teknologi sangat dominan, sehingga perlu suatu konsep revolusi baru untuk mendorong peran manusia agar dapat mengimbangi kemajuan teknologi yang telah tersedia. Konsep revolusi yang baru ini dikenal dengan Society 5.0. Artinya pada masa society 5.0 ini manusia dituntut untuk lebih memiliki kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis, dan kreativitas. Jadi

kehadiran society 5.0 dapat menjadi akan menjadi solusi atas persoalan diatas bukan malah menyaingi apa yang sudah ada pada era revolusi industry 4.0. Pada prinsipnya memdasarkan pada peranan manusia itu sendiri Bersama teknologi yang sudah tercipta, sehingga terjadi keseimbangan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah social.melalui system yang sangat menghubungkan memlalui dunia maya dan duna nyata.

## 2. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dengan memperhatikan kondisi geografis dan luas wilayah dimana jarak antar satu kecamatan dengan kecamatan lainnya relative jauh, sebaran penduduk merata, sehingga ada wilayah yang tidak komersil bagi provider telekomunikasi hal ini menimbulkan adanya wilayah yang masih belum terlayani jaringan Telekomunikasi. Area yang blankspot ini menyebabkan masyarakat sulit berkembang karena akses informasi sangat terbatas.

Ketersediaan infrastruktur TIK sangat berperan dalam mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga warga masyarakat yang tinggal jauh dari ibu kota Kabupaten Kutai Timur tidak kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan seperti penngurusan administrasi kependudukan.

Konektivitas antar wilayah melalui penyediaan infrastruktur TIK yang merata juga dapat menjadi faktor pendorong munculnya inovasi dan kreatifitas masyarakat dengan memanfaatkan potensi wilayah yang akan mewujudkan Kutai Timur yang sejahtera, maju, mandiri dan berdaya saing.

## 3. Implementasi e-Government/ SPBE

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yakni penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipatif merupakan tuntutan yang tidak mungkin lagi ditolak. Paradigma ini membawa konsekuensi pada perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi berperan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melainkan memberikan peluang seluas-luasnya dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi (society participation) dalam proses pembangunan bangsa.

e-Government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang mensinergikan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi informasi. Konsep ini telah menjadi pilihan dunia sebagai salah satu upaya dalam melakukan pembenahan administrasi pemerintahan di semua jajaran menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Implementasi e-government di Kabupaten Kutai Timur telah dimulai dikembangkan beberapa tahun yang lalu. Namun secara substansif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e-government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya yang mencakup kebijakan, infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

#### 4. Smart City

Beberapa negara, termasuk Indonesia meyakini bahwa konsep kota pintar (smart city) dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan pembangunan dengan mengadaptasi kemajuan teknologi informasi. Arah kebijakan pengembangan smart city di Indonesia merupakan upaya mendorong transformasi digital pada pemerintah daerah. Prioritas pengembangan smart city diarahkan untuk memenuhi pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar terlebih dahulu. Konsep smart city yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dirancang secara berkesinambungan dan terus berkembang agar: 1) membantu dan memudahkan berbagai kegiatan masyarakat; 2) mengelola sumberdaya yang ada dengan efisien; 3) memberikan peningkatan pelayanan publik yang menunjang peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat; dan 4) dapat mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Apabila ditinjau dari dimensi smart city terdapat antara lain dimensi institusional, dimensi manusia, dan dimensi teknologi. Sedangkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) hanya berperan sebagai enabler. Adapun komponen dasar non teknologi yang perlu diperhatikan adalah pemerintahan dan kelembagaan, kebijakan politik, manajemen dan organisasi, serta masyarakat.

Pada tahun 2018 Kabupaten Kutai Timur telah terpilih dan ditetapkan menjadi salah satu kabupaten/kota yang mengikuti Gerakan Menuju 100 Smart City. Program smart city ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas,

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian PUPR, dan Kantor Staf Kepresidenan. Bagi Kutai Timur dengan mengikuti program dalam gerakan smart city adalah untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi guna menjawab tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, investasi teknologi di masa lima tahun mendatang adalah sangat penting dan harus diikuti pemanfaatannya yang efektif untuk tatakelola internal dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan informatika, dimana ditetapkan bahwa salah satu fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) di bidang komunikasi dan informatika adalah menyelenggarakan Ekosistem TIK Smart City. Dengan demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur berperan sebagai leading sector dalam implementasi smart city.

#### 5. Informasi dan Komunikasi Publik

- Bidang Komunikasi dan inforamtika telah mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar. Media komunikasi yang dikembangkan dengan dukungan teknologi sudah begitu maju dan mudah didapat oleh masyarakat. Meski demikian masih banyak warga masyarakat yang belum akrab dengan media-media tersebut dan masih membutuhkan media informasi yang diselenggarakan dalam bentuk konvensional seperti dialog interaktif, siaran keliling, sosialisasi dan pertunjukan rakyat.
- Diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan tantangan bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya. Dalam hal ini hak warga negara untuk mengetahui kebijakan publik mulai perencanaan, proses pembuatan sampai pelaksanaannya dijamin oleh Undang-Undang dan menjadi wajib hukumnya bagi pelayan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tantangan yang harus memperoleh perhatian adalah mempersiapkan diri bagi aparatur secara individu maupun kelembagaan dan mendorong tumbuhnya kesiapan dari semua pihak, baik kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat secara umum.
- Media penyiaran lokal pemerintah daerah, dibutuhkan dalam memberikan kesinambungan informasi, Pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang positif,



serta dapat menjadi media dalam mempromosikan berbagai potensi dan kearifan local yang tersebar disemua wilayah Kabupaten Kutai Timur. Namun saat ini kedua media penyiaran UPT. Radio dan UPT. Televisi belum optimal dalam menjalankan perannya karena jangkauan siarannya belum mencakup semua kecamatan yang ada di Kab. Kutai Timur.

Dengan adanya Pengelolaan informasi dan komunikasi public yang baik akan menciptakan hubungan yang baik antara Pemerintah dengan berbagai pihak seperti hubungan antara pemerintah dengan masyarakat ( G To C ), pemerintah dengan dunia usaha ( G To B).

#### 6. Satu Data

Kebijakan tata kelola Satu Data Indonesia ditingkat pemerintah pusat dalam rangka menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan pemerintah daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan data induk.

Dilingkup Pemerintah Daerah pengelolaan satu data diselenggarakan untuk menyediakan data dan informasi yang seragam, lengkap, actual, valid dan akuntabel serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, antar pemerintah daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Melalui penyelenggaraan pengelolaan satu data di Kabupaten Kutai Timur diharapkan terwujud keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data, serta merupakan upaya untuk mendukung system statistic nasional dan system statistic sectoral daerah.

#### 7. Keamanan Informasi

Pemnfaatan TIK dalam penyelenggaraan tentu saja sangat membantu dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun penyelenggaraan tata kelola ini memerlukan system keamanan untuk menghindari hal-hal yang dapat mengganggu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya Sistem keamanan informasi

yang baik maka data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah tetap akan terjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaannya.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik berdasarkan fungsi pelayanan masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

| <b>Bidang</b>                          | <b>Permasalahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Upaya Pemecahan Masalah</b>                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesekretariatan                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi</li> <li>2. Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi untuk mendukung pelayanan administrasi</li> <li>3. Terbatasnya anggaran dana guna mendukung pelaksanaan administrasi</li> </ol>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pinjam pakai barang</li> <li>- Mengikutsertakan Aparatur yang ada dalam kegiatan Bimtek</li> <li>- Mengoptimalkan plafon anggran yang ada</li> </ul>               |
| Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung tugas dan fungsi bidang Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>2. Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>3. Pembagian tugas dan fungsi</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekerja sama dengan berbagai pihak penyelenggara media informasi.</li> <li>- Membentuk tim yang meibatkan opd lain</li> <li>- Memanfaatkan media penyiaran lokal.</li> </ul> |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>masih tumpang tindih antar perangkat daerah</p> <p>4. Belum semua OPD menyediakan daftar informasi publik</p> <p>5. Belum optimalnya pelayanan penanganan pengaduan informasi publik</p> <p>6. Belum terbentuknya kelompok informasi masyarakat (KIM) di seluruh Kecamatan.</p>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Infrastruktur TI dan Telematika | <p>1. Terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemanfaatan dan pengembangan aplikasi informatika</p> <p>2. Kebijakan untuk mendukung implementasi TIK dalam pemerintahan.</p> <p>3. Jaringan Fiber Optik yang dibangun belum menjangkau semua OPD</p> <p>4. Rendahnya Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>5. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Infrastruktur TI dan</p> | <p>- Menambah ketersediaan infrastruktur TIK untuk meningkatkan konektivitas antar OPD melalui penambahan jaringan FO, VSAT dan teknologi jaringan lainnya melalui kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>- Merekrut tenaga kontrak yang memiliki kompetensi bidang TI.</p> <p>- Bekerja sama dengan penyedia barang dan jasa bidang TI</p> <p>- Mengoptimalkan pengelolaan bandwidth yang ada</p> |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>Telematika khususnya tenaga teknis TI dan programmer.</p> <p>6. Pengelolaan bandwidth belum terpusat di Dinas kominfo yang menimbulkan kurang efisiensi dan efektifitas penggunaannya.</p> <p>7. Infrastruktur jaringan internet dan telekomunikasi yang belum merata menjadi salah satu penghambat peningkatan daya saing daerah.</p> <p>8. Rendahnya Pengembangan pemanfaatan TIK dalam mendorong peningkatan berbagai sector pembangunan.</p> <p>9. Masih rendahnya dukungan dan kerjasama antar perangkat daerah dalam proses integrasi system informasi/ aplikasi.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekerja sama dengan provider jaringan telekomunikasi</li> <li>- Membentuk tim yang melibatkan opd lainnya</li> </ul>                                                                 |
| Bidang Persandian dan Statistik | <p>1. Terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Persandian dan Statistik</p> <p>2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bekerja sama dengan BPS</li> <li>- Membentuk Tim/ Forum Pengelola Satu Data</li> <li>- Pembuatan Peraturan Bupati Tentang Sistem Pengelolaan satu data di Kabupaten Kutai</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Persandian dan Statistik</p> <p>3. Kurangnya pemahaman pegawai dan masyarakat akan arti pentingnya data</p> <p>4. Masih rendahnya pemahaman pentingnya keamanan informasi sehingga penerapan system keamanan yang sesuai standar belum berjalan dengan baik.</p> <p>5. Belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Persandian dan Statistik</p> | <p>Timur.</p> <p>- Berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN)</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

### 3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah : **“Menata Kutai Timur sejahtera untuk semua”**. Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kutai Timur Sejahtera adalah Kondisi Masyarakat Kutai Timur dalam keadaan baik, Makmur, sehat, damai dan dapat mengakses semua infrastruktur pelayanan dasar.

Menata Untuk Semua adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga terwujud perubahan positif dan lebih

produktif ( Continuous Improvement) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup disemua lapisan masyarakat.

Dalam mendukung Visi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dituangkan dalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu
2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian
3. Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi
5. Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Dalam RPJMD tahun 2021-2026 terdapat Tiga tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan misi 3 dan 4 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik adalah:

Tabel 3.2 Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD tahun 2021 - 2026

| <b>Misi</b>                                                                                | <b>Tujuan</b>                                                                                                 | <b>Sasaran</b>                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata                  | Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata | a. sasaran yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah meningkatnya Infrastruktur Teknologi dan Informasi |
| Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi | Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik                 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan                                                          |
|                                                                                            | Menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas                                                | kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah                      |

Konsep *good governance*, yang menitikberatkan pada bagaimana membangun hubungan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta sebagai stakeholder yang berperan penting dalam proses pembangunan daerah dan pengelolaan sektor publik. Melalui konsep *good governance* ini pembangunan daerah dan pengelolaan sektor publik dilakukan dengan berbasis pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi online antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*).

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Kutai Timur yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk mencapai kondisi yang diinginkan, yaitu:

- Tersedianya Infrastruktur TIK untuk memenuhi layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan ekonomi bagi masyarakat secara merata dan proporsional di semua wilayah Kab. Kutai Timur.
- Meratanya informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui dan memahami serta ikut serta dalam program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat.
- Keberadaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok Diskominfo

Persandian dan Statistik merupakan jembatan yang sangat strategis dalam memperlancar sasaran program

- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang TIK melalui literasi digital sehingga terwujud masyarakat Kutai Timur yang cerdas dan bijak dalam memanfaatkan TIK. Disamping itu dengan dukungan infrastruktur TIK akan mendorong percepatan transformasi digital di Kab. Kutai Timur sehingga yang dapat mewujudkan masyarakat digital dan ekonomi digital.

Keterkaitan Sasaran strategis dalam RPJMD Kab. Kutai Timur dengan tugas pokok dan fungsi setiap bidang pada Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik dapat dilihat pada table 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Keterkaitan Sasaran strategis dalam RPJMD Kab. Kutai Timur dengan tugas pokok dan fungsi setiap bidang pada Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik

| No | Sasaran strategis                                                                                                           | Bidang                                 | Sasaran strategis setiap bidang                                                                                                                                                                           | Program                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tersedianya infrastuktur TIK untuk mendukung layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan ekonomi yang proporsional dan merata | Bidang Infrastruktur TI dan telematika | Penyediaan dan Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi                                                                                                                              | Program Aplikasi Informatika                                                                       |
|    |                                                                                                                             | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik |                                                                                                                                                                                                           | Program Informasi dan Komunikasi Publik                                                            |
|    |                                                                                                                             | Bidang Persandian dan Statistik        |                                                                                                                                                                                                           | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi<br>Program Penyelenggaraan Statistik |
| 2  | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel                                         | Sekretariat                            | Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal khususnya dibidang TIK<br>Tersedianya sarana dan prasaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. | Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah                                                         |



|   |                                                                             |                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                             | Bidang Infrastruktur TI dan telematika | Mengimplementasikan SPBE, E-Government, dan Smart City dalam tata kelola pemerintahan                                     | Program Aplikasi Informatika                                                                                    |
|   |                                                                             | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Terlaksananya keterbukaan Informasi Publik                                                                                | Program Informasi dan Komunikasi Publik                                                                         |
|   |                                                                             | Bidang Persandian dan Statistik        | Tersedianya system data dan statistic yang terintegrasi<br><br>Terlaksananya urusan persandian untuk pengamanan informasi | Program penyelenggaraan statistik sectoral<br><br>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi |
| 3 | Terselenggaranya layanan public yang berkualitas berbasis interoperabilitas | Bidang Infrastruktur TI dan telematika | Peningkatan konektivitas antar OPD<br><br>Meningkatnya Pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik                             | Program Aplikasi Informatika                                                                                    |
|   |                                                                             | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Meningkatnya ketersediaan data dan informasi                                                                              | Program Informasi dan Komunikasi Publik                                                                         |
|   |                                                                             | Bidang Persandian dan Statistik        | Tersedianya system pengamanan data dan informasi.                                                                         | Program penyelenggaraan statistik sectoral<br><br>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi |

Faktor penghambat dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Faktor penghambat dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026

| No | Tujuan                                                                                                        | Sasaran                                                         | Faktor Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Faktor Pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Menata semua layanan kebutuhan Infrastruktur dasar dan Ekonomi bagi masyarakat secara Proporsional dan Merata | Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Teknologi dan Informasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya wilayah yang belum terjangkau layanan telekomunikasi untuk wilayah yang tidak komersil bagi provider telekomunikasi.</li> <li>2. Masih rendahnya adaptasi masyarakat dan aparatur perangkat daerah terhadap perkembangan TIK</li> <li>3. Legalitas Penyelenggaraan jasa Pos dan Telekomunikasi</li> </ol>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI)</li> <li>- Sebagian Masyarakat sudah mulai menggunakan layanan digital</li> <li>- Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat</li> </ul>                                                                       |
| 2  | Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik                 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya pemanfaatan TIK dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public.</li> <li>2. Rendahnya pemahaman masyarakat dan perangkat daerah akan pentingnya data dan informasi</li> <li>3. Belum optimalnya penerapan kebijakan dalam penyelenggaraan sistem informasi publik</li> <li>4. Terbatasnya sarana dan</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Daerah telah memiliki Jaringan Fiber Optik mandiri</li> <li>- Suda ada Ruang NOC/ Data Center</li> <li>- Adanya aplikasi yang disediakan pemerintah pusat.</li> <li>- Adanya penyedia barang dan jasa dibidang IT</li> <li>- Adanya dana dan dukungan Tim</li> </ul> |

|   |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                |                                                                                                 | <p>prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi</p> <p>5. Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi untuk mendukung pelayanan administrasi</p> <p>6. Terbatasnya anggaran</p> <p>7. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk menukung keamanan informasi.</p>                                                                                                 | <p>Anggaran Pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program-program pemerintah daerah khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi</p> <p>- Adanya lembaga BSSN</p>                                                                        |
| 3 | Menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas | Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah | <p>1. Belum Optimalnya ketersediaan Infrastruktur TIK pendukung penerapan sistem informasi yang terintegrasi</p> <p>2. Masih lemahnya kebijakan yang mendukung implementasi layanan public berbasis interoperabilitas.</p> <p>3. Managemen Tata kelola TIK belum berjalan dengan baik.</p> <p>4. Terbatasnya jumlah tenaga teknis/ programer dan tenaga ahli bidang IT</p> | <p>- Pemerintah Daerah telah memiliki Jaringan Fiber Optik mandiri yang memungkinkan pengintegrasian sistema informasi</p> <p>- Adanya Tenaga fungsional ASN yang memiliki kualifikasi Pendidikan dibidang IT</p> <p>- Adanya kebijakan pendukung penerapan e-government, Smart</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | city<br>- Adanya penyedia barang dan jasa dibidang TI<br>- Adanya peraturan bupati tentang sistem pengelolaan satu data di Kab. Kutai Timur. |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra

Tujuan Renstra Kementerian Kominfo meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, pembangunan lingkungan hidup, penguatan stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sektor*. Tujuan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
- b. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
- c. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Berdasarkan telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024, maka diidentifikasi keterkaitan antara permasalahan OPD dengan ketercapaian sasaran dalam renstra tersebut, sebagaimana yang tergambar dalam tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5

Identifikasi keterkaitan antara permasalahan OPD dengan ketercapaian sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

| No. | Sasaran<br>Strategis<br>Kementrian<br>Kominfo                      | Permasalahan<br>OPD terkait<br>dengan Sasaran<br>Renstra K/L      | Faktor                                                                                                      |                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                    |                                                                   | Penghambat                                                                                                  | Pendorong                                                                      |
| 1   | Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau | Pembangunan Infrastruktur jaringan TIK                            | Legalitas Penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi                                                       | Adanya komitmen pemerintah daerah mewujudkan kutai timur merdeka signal        |
| 2   | Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis          | Pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap TIK masih rendah | - Masih rendahnya dukungan pemerintah daerah dalam mendorong pemanfaatan teknologi digital disektor ekonomi | - Sebagian Masyarakat sudah memanfaatkan jaringan media sosial dalam berbisnis |
| 3   | Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital                         | Lambatnya adaptasi masyarakat terhadap Teknologi digital          | Masih rendahnya kegiatan literasi digital                                                                   | Keberadaan lembaga pendidikan di bidang TIK dan organisasi profesi             |
| 4   | Dukungan implementasi digitalisasi                                 | Rendahnya Pemanfaatan TIK dalam                                   | Koneksitas antar perangkat daerah melalui                                                                   | Pemerintah daerah sudah memiliki jaringan FO                                   |

|   |                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                |
|---|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | pemerintah                                     | meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan masyarakat yang disebabkan oleh jaringan TIK belum mencakup semua OPD dan SDM yang memiliki kompetensi bidang IT masih terbatas. | jaringan TIK                                                    | mandiri dan adanya kemitmen menerapkan system interoperabilitas antar unit instansi pemerintah |
| 5 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik | Implementasi SPBE / e-Government belum optimal                                                                                                                                                  | Terbatasnya kebijakan Tata kelola SPBE, infrastruktur, dan SDM. | Kutai Timur masuk dalam program implementasi 100 Smart City                                    |

Berdasarkan telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023, maka diidentifikasi keterkaitan antara permasalahan OPD dengan ketercapaian sasaran dalam renstra tersebut, sebagaimana yang tergambar dalam tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.6

Identifikasi keterkaitan antara permasalahan OPD dengan ketercapaian sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

| No. | Sasaran<br>Strategis Dinas<br>Kominfo<br>Provinsi<br>Kalimantan<br>Timur                                    | Permasalahan<br>OPD terkait<br>dengan Sasaran<br>Renstra K/L                              | Faktor                                                |                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                             |                                                                                           | Penghambat                                            | Pendorong                                                                  |
| 1   | Terintegrasinya sistem perencanaan dan kerjasama pembangunan tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota | Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antar pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten | Legalitas penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi | Adanya komitmen pemerintah daerah mewujudkan kutai timur merdeka signal    |
| 2   | Optimalisasi penggunaan aplikasi yang terintegras                                                           | Masih lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung pemanfaatan TIK.         | - Koneksitas jaringan TIK antar OPD                   | - Adanya kebijakan implementasi e-Government dan Smart City                |
| 3   | Optimalisasi Program SPBE untuk pemutakhiran data/informasi pembangunan daerah                              | Masih rendahnya peran OPD dalam menyiapkan data/informasi                                 | Kurangnya kegiatan sosialisasi                        | Adanya Kebijakan sistem pengelolaan satu data daerah Kabupaten Kutai Timur |

### **3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Proses penelaahan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan renstra OPD. Sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kab. Kutai Timur salah satu perencanaan struktur ruang di wilayah Kab. Kutai Timur adalah sistem jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan telekomunikasi sehingga area yang blankspot dapat diminimalisir.

Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan telekomunikasi yang merata diseluruh wilayah Kabupaten kutai timur dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Kutai Timur merdeka signal yang akan mendukung terwujudnya Smart City di Kabupaten Kutai Timur.

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS :

#### **Faktor Penghambat :**

1. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata yang menimbulkan adanya area yang tidak terlayani jaringan internet dan layanan telekomunikasi.
2. Tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dibidang TI masih rendah.
3. Penyebaran informasi belum merata pada semua lapisan masyarakat.

#### **Faktor Pendorong :**

1. Adanya kebijakan yang mendukung pengelolaan dan pengembangan TIK di tingkat pemerintah daerah.
2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan daerah dalam pemerataan infrastruktur TIK dan pengembangan SDM.
3. Keberadaan provider telekomunikasi dan Internet Services Provider (ISP).



4. Dukungan Pemerintah pusat melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.
5. Kemitraan dengan berbagai media informasi.
6. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dan media informasi milik pemerintah daerah.

### **3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur tidak bisa lepas dari isu-isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur mengampu tiga urusan wajib yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini tentu saja akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahun ke depan, yaitu Tahun 2021 – 2026. Dalam rangka menggali isu-isu strategis yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun kedepan, maka perlu dicari permasalahan-permasalahan dari masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik.

- Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Identifikasi factor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja OPD, adalah sebagai berikut :

#### **A. Faktor Internal**

- Kekuatan :

1. Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
2. Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kutai Timur cukup memadai hal ini dapat dilihat dari komposisi golongan, pangkat, jabatan fungsional dan eselonisasi jabatan serta latar belakang pendidikan, sehingga optimalisasi pelayanan kepada masyarakat akan bisa dicapai.
3. Adanya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja sektor pembangunan yang akan dikembangkan

4. Adanya kepemimpinan Kepala daerah yang memiliki integritas, kapabilitas, akseptabilitas dan mobilitas yang tinggi, memungkinkan aspirasi yang berkembang lebih cepat diakomodasi, juga memiliki kemampuan membangun Partner Aliansi Strategic dengan berbagai lembaga pemerintahan seperti legislatif, yudikatif dan alim ulama serta ormas, orsospol.
  5. Pemerintah daerah telah memiliki jaringan Fiber Optik mandiri, fasilitas data center (NOC) dan sarana prasarana penunjang lainnya.
  6. Adanya kebijakan pengelolaan informasi publik dan media informasi milik pemerintah daerah.
- Kelemahan :
1. Kurangnya kegiatan peningkatan kompetensi Aparatur pemerintah
  2. Regulasi/ peraturan yang mengatur pengembangan TIK, informatika, pos dan telekomunikasi.
  3. Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal.
  4. Sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di OPD
  5. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi.

## **B. Faktor Eksternal**

- Peluang
1. Meningkatnya sarana dan prasarana bidang TIK di masyarakat.
  2. Dukungan layanan digital akan memicu meningkatnya ekonomi masyarakat
  3. Meningkatnya bandwidth yang ada, serta terfokusnya pengelolaan bandwidth di Dinas Kominfo sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal.
  4. Meningkatnya jumlah pelayanan public yang diselenggarakan secara online
  5. Meningkatnya tata kelola wilayah dan daya saing daerah melalui implementasi smart city

6. Penyelenggaraan Statistik sectoral untuk mendukung ketersediaan data yang lengkap, akurat dan update serta dapat diakses dengan mudah.
  7. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi
- Ancaman
1. Perubahan kebijakan pemerintah pusat melalui regulasi yang berdampak pada dinamika pembangunan di Kutai Timur
  2. Timbulnya permasalahan sosial yang disebabkan oleh rendahnya kualitas pelayanan dasar, menurunnya stabilitas keamanan dan lambatnya transpormasi pelayanan publik
  3. Keamanan sitem informasi yang dikelola pemerintah.
  4. Kebebasan dalam penggunaan media social

Tabel 3.7  
IFAS (Internal Strategic Factor Analysis Summary)

| NO | FAKTOR                                                                            | BOBOT | RATING | BOBOT<br>X<br>RATING<br>(3X4) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|
| 1  | 2                                                                                 | 3     | 4      | 5                             |
|    | <b>Kekuatan (Strength)</b>                                                        |       |        |                               |
| 1  | Adanya peraturan Daerah pembentukan Dinas Kominfoperstik                          | 0,3   | 4      | 1,2                           |
| 2  | Jumlah SDM yang memadai                                                           | 0,2   | 3      | 0,6                           |
| 3  | Kemampuan pendanaan Pembangunan                                                   | 0,15  | 2      | 0,3                           |
| 4  | Leadership Kepala daerah yang memiliki integritas, kapabilitas dan akseptibiitas. | 0,25  | 4      | 1                             |
| 5  | Pemerintah daerah telah menggunakan teknologi sistem informasi                    | 0,05  | 1      | 0,05                          |
| 6  | Adanya kebijakan pendukung                                                        | 0,05  | 3      | 0,15                          |

|   |                                                                                                        |          |   |             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------|
|   | pengelolaan informasi publik dan media informasi milik pemerintah daerah.                              |          |   |             |
|   | Jumlah                                                                                                 | 1        |   | 3,30        |
|   | <b>Kelemahan (Weakness)</b>                                                                            |          |   |             |
| 1 | Kurangnya kegiatan peningkatan kompetensi Aparatur pemerintah                                          | 0,25     | 3 | 0,75        |
| 2 | Regulasi/ peraturan yang mengatur pengembangan TIK, informatika, pos dan telekomunikasi.               | 0,3      | 4 | 1,2         |
| 3 | Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal. | 0,2      | 3 | 0,6         |
| 4 | Sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di OPD                                       | 0,15     | 2 | 0,3         |
| 5 | Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi                                                        | 0,1      | 1 | 0,1         |
|   | Jumlah                                                                                                 |          |   |             |
|   | <b>TOTAL</b>                                                                                           | <b>1</b> |   | <b>2,95</b> |

Tabel 3.8  
EFAS (External Strategic Factor Analysis Summary)

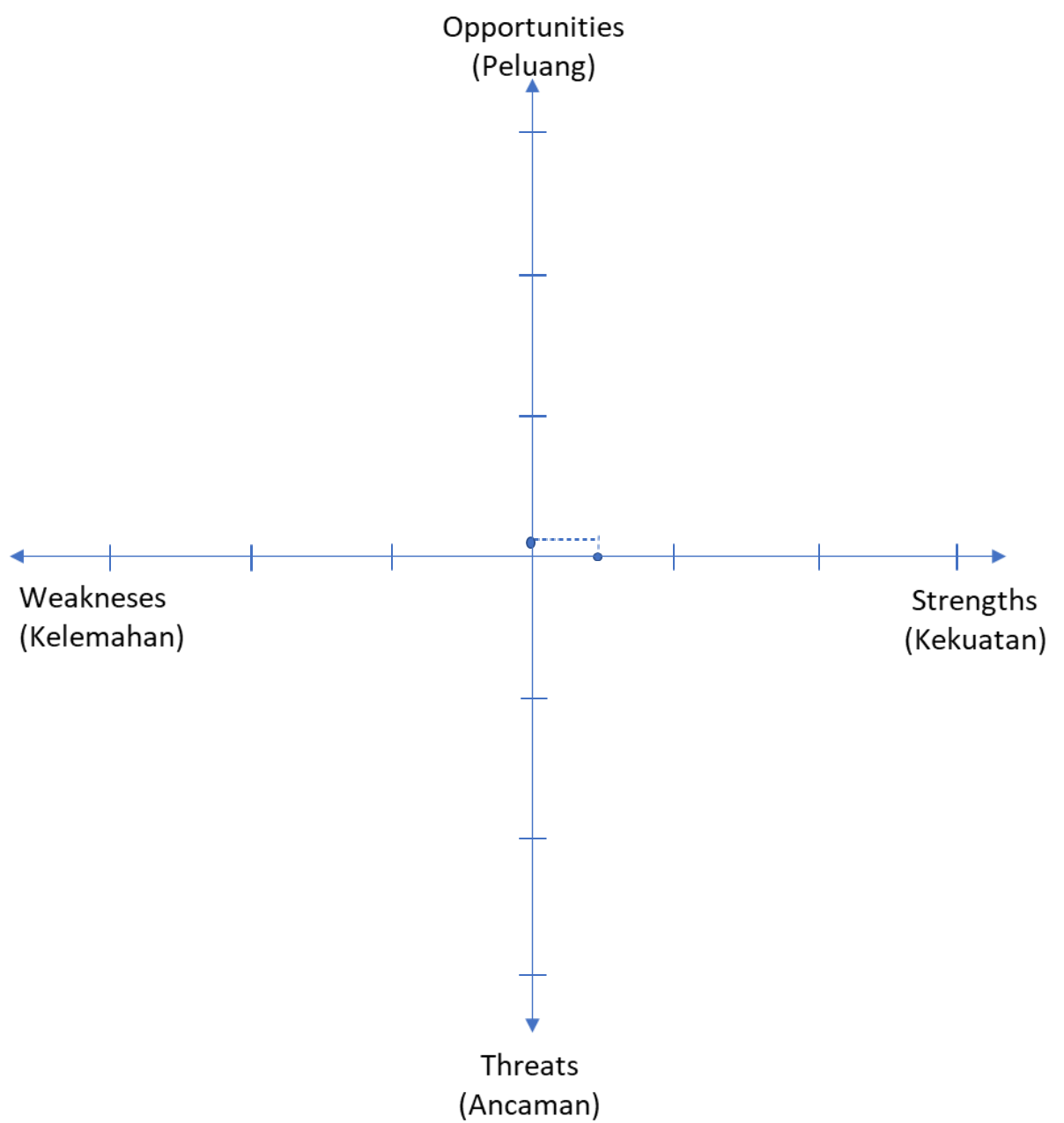
| NO | FAKTOR                                                         | BOBOT | RATING | BOBOT X RATING (3X4) |
|----|----------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|
| 1  | 2                                                              | 3     | 4      | 5                    |
| 1  | Peluang (Opportunity)<br>Meningkatnya bandwith yang ada, serta | 0,25  | 4      | 1                    |

|    |                                                                                                                                                                 |       |    |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|
|    | terpokusnya pengelolaan bandwidth di Dinas Kominfo sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal.                                                                 |       |    |      |
| 2  | Meningkatnya jumlah pelayanan public yang diselenggarakan secara online                                                                                         | 0,1   | 4  | 0,4  |
| 3  | Meningkatnya sarana dan prasarana di masyarakat.                                                                                                                | 0,05  | 1  | 0,05 |
| 4  | Dukungan layanan digital akan mendorong meningkatnya Ekonomi Masyarakat                                                                                         | 0,075 | 2  | 0,15 |
| 5  | Meningkatnya tata kelola wilayah dan daya saing daerah melalui implementasi smart city                                                                          | 0,2   | 3  | 0,6  |
| 6  | Penyelenggaraan Statistik sectoral                                                                                                                              | 0,15  | 2  | 0,3  |
| 7  | Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi                                                                                                           | 0,175 | 2  | 0,35 |
|    | Jumlah                                                                                                                                                          | 1     | 18 | 2,85 |
|    | Ancaman (Threat)                                                                                                                                                |       |    |      |
| 1  | Perubahan kebijakan pemerintah pusat melalui regulasi yang berdampak pada dinamika pembangunan di Kutai Timur                                                   | 0,25  | 4  | 1    |
| 2. | Timbulnya permasalahan sosial yang disebabkan oleh rendahnya kualitas pelayanan dasar, menurunnya stabilitas keaman dan lambatnya transpormasi pelayanan publik | 0,35  | 2  | 0,7  |
| 3. | Keamanan sitem informasi yang dikelola pemerintah.                                                                                                              | 0,3   | 3  | 0,9  |
| 4. | Kebebasan dalam penggunaan media social                                                                                                                         | 0,1   | 1  | 0,1  |
|    | Jumlah                                                                                                                                                          |       |    |      |

|       |   |    |     |
|-------|---|----|-----|
| TOTAL | 1 | 10 | 2,7 |
|-------|---|----|-----|

Nilai indeks faktor internal (titik aksis) X = Kekuatan - kelemahan = 0,35

Nilai indeks faktor eksternal (titik ordinat) Y= Peluang – tantangan Y = 0,15



Hasil analisis data pada table Analisa SWOT diatas analisis menggunakan Strengths – Opportunities yang menggunakan strategi agresif karena ditunjang oleh kekuatan internal atau keunggulan untuk meraih peluang yang ada dalam hal ini perpotongan IFAS dan EFAS berada di kuadran I.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Staistik adalah Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan Statistik di daerah, setelah memperhatikan faktor internal, eksternal termasuk memperhatikan tantangan dan peluang, kekuatan dan kelemahan, maka kedepan disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah sebagai berikut :

1. Pemerataan ketersediaan infrastruktur jaringan internet dan Telekomunikasi di semua wilayah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi.
2. Terwujudnya Kabupaten Kutai Timur Smart City melalui strategi pelayanan berbasis *Information Communication Technology* (ICT) yang terintegrasi dengan arah kebijakan integrasi pelayanan di seluruh instansi pemerintahan dan mendorong munculnya inovasi dalam peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah.
3. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan
4. Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Optimalisasi tata kelola informasi dan komunkasi Pubik
6. Optimalisasi peran media informasi milik pemerintah daerah.
7. Penguatan jalur koneksitas antar unit kerja
8. Peningkatan implementasi e-Government Pemerintah Kabupaten
9. Pengembangan data center (pusat data) yang aman dan handal
10. Optimalisasi penyelenggaraan Statistik Sektoral.
11. Penguatan system keamanan informasi pemerintah daerah
12. Peningkatan pemanfaatan TIK di ruang public.





## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik.

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang karenanya tujuan disusun untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sedangkan sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan RPJMD Kab. Kutai Timur tahun 2021 – 2026, dalam upaya tercapainya visi dan misi maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang menjadi sasaran strategis Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik yaitu :

| No. | Indikator                                               | Kondisi awal |       | Target |       |       |       |       |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
|     | Kinerja Utama                                           | 2020         | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| 1   | Cakupan Layanan Telekomunikasi                          | 58.87        | 73.76 | 77.37  | 80.48 | 83.17 | 85.48 | 87.48 |
| 2   | Persentase OPD Terkoneksi Fiber Optic (%)               | 17.14        | 17.14 | 25.71  | 34.29 | 48.57 | 62.86 | 77.14 |
| 3   | Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi | Ada          | Ada   | ada    | ada   | ada   | ada   | ada   |

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur beserta indikator kinerjanya sebagaimana disajikan dalam table T-C.25 berikut

Tabel T-C.25  
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur  
tahun 2021 - 2026

| No | Tujuan                                                                                                                          | Sasaran                                                         | Indikator Tujuan                                             | Indikator Sasaran              | Target Kinerja Pada Tahun Ke |         |         |         |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|    |                                                                                                                                 |                                                                 |                                                              |                                | 2022                         | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
| 1  | Menyediakan dukungan infrastruktur TIK secara merata dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi | 1. Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi | Persentase masyarakat yang mendapat layanan Informasi Publik |                                | 50 %                         | 55 %    | 60 %    | 70 %    | 80 %    |
|    |                                                                                                                                 |                                                                 |                                                              | Cakupan Layanan Telekomunikasi | 77.37 %                      | 80.48 % | 83.17 % | 85.48 % | 87.48 % |

|   |                                                                                               |                                                                                         |  |                                                                         |            |            |            |            |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2 | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui pemanfaatan TIK | 1. Meningkatnya Pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik |  | Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik | 25.71<br>% | 34.29<br>% | 48.57<br>% | 62.86<br>% | 77.14<br>% |
|   |                                                                                               |                                                                                         |  | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi                 | ada        | ada        | ada        | ada        | ada        |

| No | Program PD                   | Indikator Program PD                                         | Formula Indikator Program | Target     |            |            |            |            |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                              |                                                              |                           | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
| 1  | Program Aplikasi Informatika | Jumlah Pemanfaatan Infrastruktur TIK untuk pelayanan publik  |                           | 62 titik   | 77 titik   | 97 titik   | 117 titik  | 141 titik  |
|    |                              | Jumlah Sistem Informasi/ Aplikasi yang terintegrasi          |                           | 2 aplikasi | 2 aplikasi | 2 aplikasi | 2 aplikasi | 2 aplikasi |
|    |                              | Jumlah Perangkat daerah Yang terkoneksi jaringan Fiber Optik |                           | 3 OPD      | 3 OPD      | 5 OPD      | 5 OPD      | 5 OPD      |

|   |                                         |                                                                                                                       |  |           |           |           |           |           |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                                         | Jumlah layanan public yang diselenggarakan secara online                                                              |  | 3 layanan | 3 layanan | 5 layanan | 5 layanan | 5 layanan |
| 2 | Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Persentase OPD yang telah menyampaikan informasi publik                                                               |  | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |
|   |                                         | Persentase Tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran dan informasi dari masyarakat dalam tempo maksimal 2 X 24 Jam |  | 15 %      | 25 %      | 35 %      | 50 %      | 60 %      |

|   |                                                                                           |                                                                                |  |          |          |          |          |          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |                                                                                           | Jumlah Penyebaran Informasi melalui media (eletronik, cetak dan online)        |  | 365 kali | 365 kali | 365 kali | 365 kali | 365 kali |
| 3 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten | Persentase OPD yang menggunakan Jaringan Komunikasi Sandi                      |  | 25 %     | 35 %     | 45 %     | 60 %     | 80 %     |
|   |                                                                                           | Jumlah Layanan pengamanan informasi dilingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur |  | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        |
| 4 | Program penyelenggaraan statistik sectoral                                                | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi                        |  | ada      | ada      | ada      | ada      | Ada      |
|   |                                                                                           | Persentase OPD yang menyediakan                                                |  | 40 %     | 60 %     | 70 %     | 80 %     | 100 %    |

|   |                                               |                                                                                    |  |       |       |       |       |       |
|---|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |                                               | data statistik sektoral                                                            |  |       |       |       |       |       |
| 5 | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan layanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan Dinas Kominfoperstik |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|   |                                               | Persentase Aparatur yang mengikuti bimtek/ diklat                                  |  | 35 %  | 45 %  | 50 %  | 70 %  | 100 % |





## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan Visi, Misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan karenanya harus dapat menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu adanya strategi serta menentukan arah dari kebijakan yang dibuat.

Untuk mencapai dua misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, maka strategi dan arah kebijakan yang dibuat dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| <b>Visi : Menata Kutai Timur sejahtera untuk semu</b>                                                                           |                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional Dan Merata</b>                                       |                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                                   | <b>Sasaran</b>                                                  | <b>Strategi</b>                                       | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Menyediakan dukungan infrastruktur TIK secara merata dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi | 1. Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi | Mempercepat pemerataan ketersediaan infrastruktur TIK | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementrian Kominfo melalui Bakti</li> <li>- Meningkatkan kerjasama dengan provider telekomunikasi/ ISP/ APJI</li> <li>- Mendorong keterlibatan pihak swasta/ perusahaan yang ada di wilayah Kutai Timur</li> </ul> |

|                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                   | Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat terkait TIK.                                          | - Melakukan kemitraan dengan Relawan Digital dan Organisasi Profesi guna mengoptimalkan Ekosistem Digital.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi</b> |                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tujuan</b>                                                                                              | <b>Sasaran</b>                                                                                    | <b>Strategi</b>                                                                                            | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan public melalui pemanfaatan TIK              | 1. Meningkatnya Pemanfaatan TIK dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Meningkatkan dukungan dan kesadaran semua OPD terhadap pengembangan TI melalui penyediaan infrastruktur TI | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah jumlah OPD yang terkoneksi Jaringan FO</li> <li>- Penyediaan infrastruktur TIK, media center, Command Center.</li> <li>- Mengoptimalkan pengembangan data center yang memenuhi kebutuhan kedepan dan memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan publik yang transparan dan lebih baik</li> </ul> |

|  |  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Mengoptimalkan Penerapan SPBE                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan aplikasi pemerintahan dan Portal Maya Pemerintah Kab. Kutai Timur, serta optimalisasi domain resmi</li> <li>- Penyediaan dokumen pendukung</li> <li>- Peningkatan SDM</li> <li>- Menyusun tim pelaksana</li> </ul>                |
|  |  | Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Peran Tim Pengelola PPID yang telah ditepkan dalam Peraturan Bupati untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, trasfaran dan akuntabel.</li> <li>- Meningkatkan wawasan OPD terhadap UU NO. 14 tahun 2018</li> </ul> |
|  |  |                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan jumlah Kim yang terbentuk dan terbina.</li> <li>- Mendayagunakan media informasi dan komunikasi secara kreatif dan inovatif untuk mendukung pemerataan informasi.</li> </ul>                                                    |

|  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                  | Menguatkan fungsi Statistik                                                                                                                                                                                                           | - Optimalisasi Penerapan Kebijakan Satu data Indonesia                                                                                                                                                                                                  |
|  |                                                                                                                  | Memperkuat Pengamanan Informasi Pemerintah Kab. Kutai Timur melalui penyelenggaraan persandian                                                                                                                                        | - Penyelenggaraan pengamanan informasi yang memenuhi standar SNI ISO/ IEC 27001                                                                                                                                                                         |
|  | 2. Terwujudnya Dinas Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistic yang profesional dan berkinerja tinggi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD</li> <li>- Menyediakan Sumber daya Aparatur yang professional</li> <li>- Optimalisasi layanan adminstrasi perkantoran dan laporan keuangan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan dokumen perencanaan tepat waktu</li> <li>- Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana penunjang kinerja PD.</li> <li>- Meningkatkan keikutsertaan Aparatatur dalam kegiatan DIKLAT/ BIMTEK</li> </ul> |



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakuakn adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun.

Kegiatan yang terdiri dari beberapa sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian Visi dan misi organisasi. Disisi lain, posisi kegiatan dengan beberapa sub kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja yang secara khusus dinayatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan program dan indikator milik kabupaten yang diemban oleh masing-masing OPD. Pada tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur melaksanakan 2 (dua ) program yakni:

1. **Program Aplikasi Informatika** dengan 2 indikator yaitu Cakupan Layanan Telekomunikasi dan Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optic untuk merealisasikan program ini, dana yang dialokasikan adalah 1.175.811.090.
1. **Program penyelenggaraan statistik sectoral** dengan indikator Tersedianya system data dan statistic yang terintegrasi untuk merealisasikan program ini dana yang dialokasikan adalah Rp. 389.668.060.

Pada tahun 2022-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur melaksanakan 5 (lima) program , dimana . Hubungan



antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran I** Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program : Program Aplikasi Informatika

Kegitan :

1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur
2. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

2. **Sasaran 2** : Meningkatnya Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

A. Program : Program Aplikasi Informatika

Kegitan :

1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur
2. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

B. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Kegitan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

C. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur
2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Kutai Timur

E. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
5. Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9. Penataan Organisasi

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Kutai Timur Tahun 2021 - 2026**

| Tujuan                                                                                        | Sasaran                                                                            | Kode    | Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                       | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Kondisi Awal Tahun Perencanaan 2021 | Tahun 2022 |                                | Tahun 2023 |                                | Tahun 2024 |                                | Tahun 2025 |                                | Tahun 2026 |                                | kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra |                                | Unit Kerja Peraan gkat daerah penang gung jawab | Lokasi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
|                                                                                               |                                                                                    |         |                                                             |                                                                 |                                     | Target     | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Target     | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Target     | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Target     | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Target     | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Target                                     | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |                                                 |        |
| Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui pemanfaatan TIK | Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik | x.xx.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan layanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan   |                                     | 100 %      |                                | 100%       |                                | 100 %      |                                | 100%       |                                | 100 %      |                                | 100 %                                      |                                |                                                 |        |

|  |  |                         |                                                                                                                  |                                                                                                |  |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                      |                   |  |  |
|--|--|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|--|--|
|  |  | 2.16.0<br>1.2.01        | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                        | Tersedianya<br>dokumen<br>Perencanaan<br>dan laporan<br>Capaian Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah |  |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                  |                 |                      |                 |                      |                   |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>1.2.01.<br>01 | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                      | Tersedianya<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                      |  | 2<br>doku<br>men     | 250.000.<br>000 | 3<br>dokume<br>n | 350.000.00<br>0 | 3<br>doku<br>men     | 500.000.<br>000 | 2<br>dokume<br>n | 500.00<br>0.000 | 2<br>doku<br>men     | 500.000.<br>000 | 1<br>doku<br>men     | 2.100.00<br>0.000 |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>1.2.01.<br>02 | Koordinasi<br>dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>RKA-<br>SKPD                                                       | Terselenggaranya<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD                           |  |                      |                 | 3<br>dokume<br>n | 150.000.00<br>0 | 3<br>doku<br>men     | 150.000.<br>000 | 3<br>dokume<br>n | 150.00<br>0.000 | 3<br>doku<br>men     | 150.000.<br>000 | 3<br>doku<br>men     | 600.000.<br>000   |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>1.2.01.<br>06 | Koordinasi<br>dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar<br>Realisasi<br>Kinerja<br>SKPD | Tersedianya<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD            |  | 1<br>Dok<br>ume<br>n | 75.000.0<br>00  | 1<br>Doku<br>men | 75.000.000      | 1<br>Dok<br>ume<br>n | 75.000.0<br>00  | 1<br>Doku<br>men | 75.000<br>.000  | 1<br>Dok<br>ume<br>n | 75.000.0<br>00  | 1<br>Dok<br>ume<br>n | 375.000.<br>000   |  |  |

|  |  |                         |                                                                                       |                                                                 |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                       |                  |                   |                  |                    |  |  |
|--|--|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--|--|
|  |  | 2.16.0<br>1.2.01.<br>07 | Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Tersedianya<br>laporan Evaluasi<br>Kinerja SKPD                 |  | 1<br>doku<br>men | 50.000.0<br>00    | 1<br>dokume<br>n | 50.000.000        | 1<br>doku<br>men | 50.000.0<br>00    | 1<br>dokume<br>n | 50.000<br>.000        | 1<br>doku<br>men | 50.000.0<br>00    | 1<br>doku<br>men | 250.000.<br>000    |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>1.2.02        | <b>Administ<br/>rasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                        | Terselenggaranya<br>Pegelolaan<br>Administrasi<br>Keuangan SKPD |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                       |                  |                   |                  |                    |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>1.2.02.<br>01 | Penyediaa<br>n Gaji dan<br>Tunjangan<br>ASN                                           | Tersedianya Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                        |  | 50<br>Oran<br>g  | 5.284.33<br>4.776 | 50<br>Orang      | 5.750.000.0<br>00 | 60<br>Oran<br>g  | 5.800.00<br>0.000 | 70<br>Orang      | 7.000.<br>000.00<br>0 | 75<br>Oran<br>g  | 7.500.00<br>0.000 | 75<br>Oran<br>g  | 31.334.3<br>34.776 |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>1.2.02.<br>02 | Penyediaa<br>n Administra<br>si Pelaksana<br>an Tugas<br>ASN                          | Tersedianya Gaji<br>TK2D                                        |  | 60<br>orang      | 1.505.30<br>0.384 | 60<br>orang      | 1.600.000.0<br>00 | 60<br>orang      | 2.000.00<br>0.000 | 60<br>orang      | 2.200.<br>000.00<br>0 | 60<br>orang      | 2.300.00<br>0.000 | 60<br>orang      | 9.605.30<br>0.384  |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>1.2.02.<br>03 | Pelaksana<br>an Penatausa<br>haan dan<br>Pengujian/<br>Verifikasi<br>Keuangan<br>SKPD | Terselenggaranya<br>Pengelolaan<br>Administrasi<br>Keuangan     |  | 14<br>orang      | 100.000.<br>000   | 14<br>orang      | 150.000.00<br>0   | 14<br>orang      | 150.000.<br>000   | 14<br>orang      | 150.00<br>0.000       | 14<br>orang      | 150.000.<br>000   | 14<br>orang      | 700.000.<br>000    |  |  |

|  |  |                         |                                                                               |                                                                         |  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                   |  |  |
|--|--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|--|--|
|  |  | 2.16.0<br>1.2.02.<br>07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun |  | 2<br>doku<br>men | 50.000.0<br>00  | 2<br>dokume<br>n | 50.000.000      | 2<br>doku<br>men | 50.000.0<br>00  | 2<br>dokume<br>n | 50.000<br>.000  | 2<br>doku<br>men | 50.000.0<br>00  | 2<br>doku<br>men | 250.000.<br>000   |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>1.2.02.<br>08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Tersedianya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran           |  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                   |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>1.2.03        | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                        |                                                                         |  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                   |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>1.2.03.<br>06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Jumlah Barang Milik Daerah Yang dikelola SKPD                           |  | 6<br>bua<br>h    | 130.000.<br>000 | 8<br>buah        | 350.000.00<br>0 | 10<br>bua<br>h   | 400.000.<br>000 | 12<br>buah       | 500.00<br>0.000 | 14<br>bua<br>h   | 500.000.<br>000 | 14<br>bua<br>h   | 1.880.00<br>0.000 |  |  |

|  |  |                          |                                                                              |                                                                                                                                                           |  |                                 |                 |                                                     |                 |                                                                                                                |                 |                                                            |                 |                                                               |                 |                 |                   |  |  |
|--|--|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|--|
|  |  | <b>2.16.0<br/>1.2.05</b> | <b>Administasi<br/>Kepengawasan<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                 | Persentase<br>Aparatur yang<br>mengikuti bimtek/<br>diklat                                                                                                |  | 35%                             |                 | 45%                                                 |                 | 50%                                                                                                            |                 | 70%                                                        |                 | 100<br>%                                                      |                 | 100<br>%        |                   |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>1.2.05.<br>02  | Pengadaan<br>Pakaian<br>Dinas<br>Beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya        | Jumlah pakaian<br>dinas beserta<br>kelengkapan yang<br>disediakan                                                                                         |  |                                 |                 |                                                     |                 | 115<br>Stell<br>Baju<br>Putih<br>Celana<br>Hitam,<br>115<br>Stell<br>Baju<br>Waskat<br>dan<br>kuning<br>gading | 350.000.<br>000 |                                                            |                 |                                                               |                 | 350.000.<br>000 |                   |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>1.2.05.<br>09  | Pendidikan<br>dan Pelatihan<br>Pegawai<br>Berdasarkan<br>Tugas dan<br>Fungsi | Jumlah aparatur<br>yang mengikuti<br>Diklat                                                                                                               |  | 4<br>orang<br>PIM III<br>dan IV | 100.000.<br>000 | 8 orang<br>PIM III<br>dan IV<br>serta<br>Fungsional | 200.000.00<br>0 | 18<br>orang<br>PIM III<br>dan IV/<br>Fungsional<br>Tertentu /<br>Fungsional<br>Umum                            | 700.000.<br>000 | 20 orang<br>Fungsional<br>Tertentu /<br>Fungsional<br>Umum | 750.00<br>0.000 | 20<br>orang<br>Fungsional<br>Tertentu /<br>Fungsional<br>Umum | 750.000.<br>000 | 20<br>orang     | 2.500.00<br>0.000 |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>1.2.05.<br>10  | Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                           | Terlaksananya<br>Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan serta<br>meningkatkan<br>pemahaman<br>terhadap<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan |  |                                 |                 |                                                     |                 |                                                                                                                |                 |                                                            |                 |                                                               |                 |                 | 0                 |  |  |

|  |  |                         |                                                                            |                                                                                                         |  |  |  |  |  |           |                 |  |  |  |  |           |                 |  |  |
|--|--|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|-----------------|--|--|--|--|-----------|-----------------|--|--|
|  |  | 2.16.0<br>1.2.05.<br>11 | Bimbingan<br>Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan | terlaksananya<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                |  |  |  |  |  | 2<br>kali | 100.000.<br>000 |  |  |  |  | 2<br>kali | 100.000.<br>000 |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>1.2.06        | <b>Administrasi<br/>Umum<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                      | <b>Terlaksananya<br/>administrasi<br/>penunjang<br/>pelaksanaan<br/>urusan<br/>perangkat<br/>daerah</b> |  |  |  |  |  |           |                 |  |  |  |  |           | 0               |  |  |



|  |  |                         |                                              |                                                            |                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                           |             |                                                                                                     |             |                                                                                                                                    |             |                                                      |               |  |  |
|--|--|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------|--|--|
|  |  | 2.16.0<br>1.2.06.<br>02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai | Terpenuhi ATK 35 jenis, 5 unit Komputer, 2 unit laptop, 5 unit Scanner, 1 buah Lemari Arsip Otomatis, speaker ceiling + amplifier systems, 2 set Meja Sofa tamu, 1 set meja | 250.000.000 | Terpenuhi ATK 35 jenis, 5 unit Komputer, 1 buah Lemari Arsip Otomatis, 3 buah Lemari Buku untuk Pejabat, 1 set meja kursi, dan peralatan kantor lainnya | 250.000.000 | Terpenuhi ATK 35 jenis, 2 set meja kursi Pejabat Ess II & III, 1 set Rak Besi/ Metal barang, 20 Kursi Kerja, dan peralatan kantor lainnya | 250.000.000 | Terpenuhi ATK 35 jenis, 5 unit Komputer, 1 set Meja kursi Rapat Besar, dan peralatan kantor lainnya | 350.000.000 | Terpenuhi ATK 35 jenis, 5 unit Komputer, 2 unit laptop, 5 Unit Printer, 2 set Meja kursi Rapat kecil, dan peralatan kantor lainnya | 250.000.000 | Terpenuhi ATK 35 jenis, dan peralatan kantor lainnya | 1.350.000.000 |  |  |
|--|--|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | kursi,<br>1<br>buah<br>Mim<br>bar/P<br>odiu<br>m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |                         |                                                                                    |                                                                |  |                                                                                                     |               |                                                                                            |                 |                                                                                                         |                 |                                                                                           |                     |                                                                                                     |                 |                                                                                                     |                   |  |  |
|--|--|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
|  |  |                         |                                                                                    |                                                                |  |                                                                                                     |               |                                                                                            |                 | ngan.                                                                                                   |                 |                                                                                           |                     |                                                                                                     |                 |                                                                                                     |                   |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>1.2.06.<br>09 | Penyelenggar<br>aan Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD               | Terselenggaranya<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD |  | Terla<br>ksana<br>nya<br>50<br>kali<br>kegiat<br>an<br>Rapat<br>Koord<br>inasi<br>dan<br>Konsultasi | 3500000<br>00 | Terlaks<br>ananya<br>50 kali<br>kegiata<br>n Rapat<br>Koordin<br>asi dan<br>Konsult<br>asi | 350.000.0<br>00 | Terla<br>ksan<br>anya<br>50<br>kali<br>kegia<br>tan<br>Rapa<br>t<br>Koor<br>dinasi<br>dan<br>Konsultasi | 350.000<br>.000 | Terlaks<br>ananya<br>50 kali<br>kegiatan<br>Rapat<br>Koordin<br>asi dan<br>Konsult<br>asi | 350.0<br>00.00<br>0 | Terla<br>ksana<br>nya<br>50<br>kali<br>kegiat<br>an<br>Rapat<br>Koord<br>inasi<br>dan<br>Konsultasi | 350.000<br>.000 | Terla<br>ksana<br>nya<br>50<br>kali<br>kegiat<br>an<br>Rapat<br>Koord<br>inasi<br>dan<br>Konsultasi | 1.750.00<br>0.000 |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>1.2.07        | Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah |                                                                |  |                                                                                                     |               |                                                                                            |                 |                                                                                                         |                 |                                                                                           |                     |                                                                                                     |                 |                                                                                                     |                   |  |  |

|  |  |                         |                                                                                        |                                                                                                       |  |                                                                                                                      |                |                                                                                                    |                 |                                                                                                                      |                 |                                                                                                    |                 |                                                                                                                      |                 |                                                                                                                      |                 |  |  |
|--|--|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|
|  |  | 2.16.0<br>1.2.07.<br>02 | Pengadaan<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan                     | Tersediannya<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan                                       |  | 2 Unit<br>Kendaraan<br>Roda<br>empat, 2<br>Unit<br>Roda<br>Dua                                                       |                | 2 Unit<br>Kendaraan<br>Roda<br>empat,<br>2 Unit<br>Roda<br>Dua                                     | 600.000.00<br>0 | 3 Unit<br>Kendaraan<br>Roda<br>dua,<br>1 unit<br>roda<br>mini<br>bus                                                 |                 | 3 Unit<br>Kendaraan<br>Roda<br>dua                                                                 |                 | 2 Unit<br>Kendaraan<br>Roda<br>empat, 2<br>Unit<br>Roda<br>Dua                                                       |                 | 600.000.<br>000                                                                                                      |                 |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>1.2.08        | Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah                      | Tersedianya jasa<br>penunjang<br>penyelenggara<br>n urusan<br>perangkat<br>daerah                     |  |                                                                                                                      |                |                                                                                                    |                 |                                                                                                                      |                 |                                                                                                    |                 |                                                                                                                      |                 |                                                                                                                      |                 |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>1.2.08.<br>02 | Penyediaan<br>jasa<br>komunikasi,<br>sumber daya<br>air dan listrik                    | Terpenuhinya/<br>tercukupinya<br>kebutuhan akan<br>jasa komunikasi,<br>sumber daya air<br>dan listrik |  | Terpe<br>nuhi<br>jasa<br>komu<br>nikasi<br>,<br>sumb<br>er<br>daya<br>air<br>dan<br>listrik<br>selam<br>a 1<br>tahun | 75.000.0<br>00 | Terpenu<br>hi jasa<br>komunik<br>asi,<br>sumber<br>daya air<br>dan<br>listrik<br>selama<br>1 tahun | 150.000.00<br>0 | Terpe<br>nuhi<br>jasa<br>komu<br>nikasi<br>,<br>sumb<br>er<br>daya<br>air<br>dan<br>listrik<br>sela<br>ma 1<br>tahun | 150.000.<br>000 | Terpenu<br>hi jasa<br>komunik<br>asi,<br>sumber<br>daya air<br>dan<br>listrik<br>selama<br>1 tahun | 250.00<br>0.000 | Terpe<br>nuhi<br>jasa<br>komu<br>nikasi<br>,<br>sumb<br>er<br>daya<br>air<br>dan<br>listrik<br>selam<br>a 1<br>tahun | 150.000.<br>000 | Terpe<br>nuhi<br>jasa<br>komu<br>nikasi<br>,<br>sumb<br>er<br>daya<br>air<br>dan<br>listrik<br>selam<br>a 1<br>tahun | 775.000.<br>000 |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>1.2.09        | Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>urusan<br>Pemerintah<br>Daerah |                                                                                                       |  |                                                                                                                      |                |                                                                                                    |                 |                                                                                                                      |                 |                                                                                                    |                 |                                                                                                                      |                 |                                                                                                                      |                 |  |  |

[illegible]

|  |  |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                            |                   |  |  |
|--|--|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
|  |  | 2.16.0<br>1.2.09.<br>01 | Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan<br>dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Terpeliharanya<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan |  | 5 unit<br>kendaraan<br>roda<br>empat<br>dan 4<br>unit<br>kendaraan<br>roda 2                                                                                                 | 200.000.<br>000 | 5 unit<br>kendaraan<br>roda<br>empat<br>dan 7<br>unit<br>kendaraan<br>roda 2                                                                                                                                            | 300.000.00<br>0 | 5 unit<br>kendaraan<br>roda<br>empat<br>dan 7<br>unit<br>kendaraan<br>roda 2                                                                                                                 | 300.000.<br>000 | 5 unit<br>kendaraan<br>roda<br>empat<br>dan 7<br>unit<br>kendaraan<br>roda 2                                                                                                                 | 300.00<br>0.000 | 5 unit<br>kendaraan<br>roda<br>empat<br>dan 7<br>unit<br>kendaraan<br>roda 2                                                                                                                 | 500.000.<br>000 | 5 unit<br>kendaraan<br>roda<br>empat<br>dan 4<br>unit<br>kendaraan<br>roda 2                                                                               | 1.600.00<br>0.000 |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>1.2.09.<br>06 | Pemeliharaan<br>Peralatan<br>dan Mesin<br>Lainnya                                                                                                | Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                     |  | 1 unit<br>Genset,<br>10 unit<br>komputer<br>10 unit<br>printer,<br>10 Unit<br>AC,<br>jaringan<br>listrik 1<br>tahun,<br>Pemeliharaan<br>Peralatan<br>dan<br>Mesin<br>Lainnya | 150.000.<br>000 | 1 unit<br>Genset,<br>10 unit<br>komputer<br>10 unit<br>printer,<br>Pemeliharaan<br>23<br>Unit AC,<br>jaringan<br>listrik 1<br>tahun,<br>Pemeliharaan<br>Server,<br>Pemeliharaan<br>Peralatan<br>dan<br>Mesin<br>Lainnya | 250.000.00<br>0 | 1 unit<br>Genset,<br>10 unit<br>komputer<br>10 unit<br>printer,<br>Pemeliharaan<br>23<br>Unit AC,<br>jaringan<br>listrik 1<br>tahun,<br>Pemeliharaan<br>Peralatan<br>dan<br>Mesin<br>Lainnya | 250.000.<br>000 | 1 unit<br>Genset,<br>10 unit<br>komputer<br>10 unit<br>printer,<br>Pemeliharaan<br>23<br>Unit AC,<br>jaringan<br>listrik 1<br>tahun,<br>Pemeliharaan<br>Peralatan<br>dan<br>Mesin<br>Lainnya | 250.00<br>0.000 | 1 unit<br>Genset,<br>10 unit<br>komputer<br>10 unit<br>printer,<br>Pemeliharaan<br>23<br>Unit AC,<br>jaringan<br>listrik 1<br>tahun,<br>Pemeliharaan<br>Peralatan<br>dan<br>Mesin<br>Lainnya | 250.000.<br>000 | 1 unit<br>Genset,<br>10 unit<br>komputer<br>10 unit<br>printer,<br>jaringan<br>listrik 1<br>tahun,<br>Pemeliharaan<br>Peralatan<br>dan<br>Mesin<br>Lainnya | 1.150.00<br>0.000 |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>2             | PROGRAM<br>INFORMASI<br>DAN<br>KOMUNIKASI<br>PUBLIK                                                                                              | Cakupan Layanan<br>Telekomunikasi                                                  |  | 77.3<br>7 %                                                                                                                                                                  |                 | 80.48<br>%                                                                                                                                                                                                              |                 | 83.1<br>7 %                                                                                                                                                                                  |                 | 85.48<br>%                                                                                                                                                                                   |                 | 87.4<br>8 %                                                                                                                                                                                  |                 | 87.4<br>8 %                                                                                                                                                |                   |  |  |

|  |  |  |                         |                                                                                  |                                                                                         |  |                        |            |                        |             |                        |            |                        |            |                        |             |             |  |  |
|--|--|--|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------|------------------------|-------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-------------|-------------|--|--|
|  |  |  | 2.16.0<br>2.2.01        | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota     | Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kutai Timur |  |                        |            |                        |             |                        |            |                        |            |                        |             |             |  |  |
|  |  |  | 2.16.0<br>2.2.01.<br>01 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                | Tersedianya dokumen Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik             |  |                        |            | 10 kebijakan           | 100.000.000 |                        |            |                        |            |                        |             | 100.000.000 |  |  |
|  |  |  | 2.16.0<br>2.2.01.<br>02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                             | Pemantauan Isu Publik dan Layanan Aduan Masyarakat                                      |  | Masyarakat Kutai Timur | 75.000.000 | Masyarakat Kutai Timur | 75.000.000  | Masyarakat Kutai Timur | 75.000.000 | Masyarakat Kutai Timur | 75.000.000 | Masyarakat Kutai Timur | 375.000.000 |             |  |  |
|  |  |  | 2.16.0<br>2.2.01.<br>03 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Penetapan, Pemantauan dan Evaluasi Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah        |  |                        |            |                        |             |                        |            |                        |            |                        |             |             |  |  |



|  |  |                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                               |                 |                                                                                                |                 |                                                                                                                    |                 |                                                                                                |                 |                                                                                                                    |                 |                                                                                                                    |                   |  |  |
|--|--|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
|  |  | 2.16.0<br>2.2.01.<br>04 | Pengelolaan<br>Konten dan<br>Perencanaan<br>Media<br>Komunikasi<br>Publik | Penyusunan<br>Strategi<br>komunikasi Publik<br>dan Pengemasan<br>Konten                                                                                                                                         |  | 365<br>kali<br>taya<br>ng                                                                                                     |                 | 365<br>kali<br>tayang                                                                          | 200.000.00<br>0 | 365<br>kali<br>taya<br>ng                                                                                          | 250.000.<br>000 | 365<br>kali<br>tayang                                                                          | 200.00<br>0.000 | 365<br>kali<br>taya<br>ng                                                                                          | 200.000.<br>000 | 365<br>kali<br>taya<br>ng                                                                                          | 850.000.<br>000   |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>2.2.01.<br>05 | Pengelolaan<br>Media<br>Komunikasi<br>Publik                              | - Penyelenggaran<br>Media<br>Komunikasi Milik<br>Daerah -<br>Penyebaran<br>Informasi Publik<br>Melalui Media<br>Online dan<br>elektronik<br>Kominfo<br>-Evaluasi<br>Penggunaan<br>Media<br>Komunikasi<br>Publik |  | 5<br>Jeni<br>s<br>sara<br>na<br>Med<br>ia<br>Kom<br>unik<br>asi,<br>Kom<br>info<br>750<br>Taya<br>ng,<br>1<br>doku<br>me<br>n | 125.000.<br>000 | 5 Jenis<br>sarana<br>Media<br>Komuni<br>kasi,<br>Kominfo<br>750<br>Tayang,<br>1<br>dokume<br>n | 225.000.00<br>0 | 5<br>Jenis<br>saran<br>a<br>Medi<br>a<br>Komu<br>nikasi<br>,<br>Komi<br>nfo<br>750<br>Taya<br>ng, 1<br>doku<br>men | 225.000.<br>000 | 5 Jenis<br>sarana<br>Media<br>Komuni<br>kasi,<br>Kominfo<br>750<br>Tayang,<br>1<br>dokume<br>n | 225.00<br>0.000 | 5<br>Jenis<br>saran<br>a<br>Medi<br>a<br>Komu<br>nikasi<br>,<br>Komi<br>nfo<br>750<br>Taya<br>ng, 1<br>doku<br>men | 225.000.<br>000 | 5<br>Jenis<br>saran<br>a<br>Medi<br>a<br>Komu<br>nikasi<br>,<br>Komi<br>nfo<br>750<br>Taya<br>ng, 1<br>doku<br>men | 1.025.00<br>0.000 |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>2.2.01.<br>05 | Pengelolaan<br>Media<br>Komunikasi<br>Publik                              | - Pengembangan<br>Media<br>Komunikasi Milik<br>Daerah (RPD<br>Kutim) -<br>Penyebaran<br>Informasi Publik<br>Melalui RPD<br>Kutim                                                                                |  | 5<br>Kec<br>ama<br>tan,<br>365<br>siar<br>an                                                                                  | 175.000.<br>000 | 5<br>Keca<br>matan<br>, 365<br>siaran                                                          | 350.000.00<br>0 | 5<br>Kec<br>ama<br>tan,<br>365<br>siar<br>an                                                                       | 450.000.<br>000 | 5<br>Keca<br>matan<br>, 365<br>siaran                                                          | 450.00<br>0.000 | 5<br>Kec<br>ama<br>tan,<br>365<br>siar<br>an                                                                       | 450.000.<br>000 | 5<br>Kec<br>ama<br>tan,<br>365<br>siar<br>an                                                                       | 1.875.00<br>0.000 |  |  |

|  |  |                         |                                                               |                                                                                                     |  |                                                          |                 |                                           |                 |                                                          |                 |                                                  |                 |                                                          |                 |                                                          |                   |  |  |
|--|--|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
|  |  | 2.16.0<br>2.2.01.<br>06 | Pelayanan<br>Informasi<br>Publik                              | -Pelaksanaan<br>Fungsi PPID<br>-Pengelolaan<br>Pengaduan<br>Masyarakat                              |  | 57<br>OP<br>D                                            | 125.000.<br>000 | 57<br>OPD                                 | 225.000.00<br>0 | 57<br>OP<br>D                                            | 225.000.<br>000 | 57<br>OPD                                        | 225.00<br>0.000 | 57<br>OP<br>D                                            | 225.000.<br>000 | 57<br>OP<br>D                                            | 1.025.00<br>0.000 |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>2.2.01.<br>07 | Layanan<br>Hubungan<br>Media                                  | -Pengelolaan<br>Hubungan Media<br>dan Penyebaran<br>Informasi melalui<br>Media                      |  | 300<br>kali<br>terbit                                    | 200.000.<br>000 | 300<br>kali<br>terbit                     | 600.000.00<br>0 | 300<br>kali<br>terbit                                    | 600.000.<br>000 | 300<br>kali<br>terbit                            | 600.00<br>0.000 | 300<br>kali<br>terbit                                    | 600.000.<br>000 | 300<br>kali<br>terbit                                    | 2.600.00<br>0.000 |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>2.2.01.<br>08 | Kemitraan<br>dengan<br>Pemangku<br>Kepentingan                | Jumlah Kelompok<br>Informasi<br>Masyarakat yang<br>dikelola<br>Pengembangan<br>dan<br>Pemberdayaan) |  | 5<br>KIM                                                 | 50.000.0<br>00  | 5 KIM                                     | 50.000.000      | 5<br>KIM                                                 | 50.000.0<br>00  | 5 KIM                                            | 50.000<br>.000  | 5<br>KIM                                                 | 50.000.0<br>00  | 5<br>KIM                                                 | 250.000.<br>000   |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>2.2.01.<br>09 | Manajemen<br>Komunikasi<br>Krisis                             | Penanganan<br>Pengelolaan dan<br>Evaluasi<br>Komunikasi Krisis                                      |  | Laya<br>nan<br>Peng<br>adua<br>n<br>Publi<br>k 57<br>OPD | 50.000.0<br>00  | Layanan<br>Pengadu<br>an Publik<br>57 OPD | 250.000.00<br>0 | Laya<br>nan<br>Peng<br>adua<br>n<br>Publi<br>k 57<br>OPD | 250.000.<br>000 | Layana<br>n<br>Pengad<br>uan<br>Publik<br>57 OPD | 250.00<br>0.000 | Laya<br>nan<br>Peng<br>adua<br>n<br>Publi<br>k 57<br>OPD | 250.000.<br>000 | Laya<br>nan<br>Peng<br>adua<br>n<br>Publi<br>k 57<br>OPD | 1.050.00<br>0.000 |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>2.2.01.<br>10 | Penguatan<br>Kapasitas<br>Sumber Daya<br>Komunikasi<br>Publik | Meningkatnya<br>SDM Bidang<br>Informasi dan<br>Komunikasi<br>Publik                                 |  | 15<br>oran<br>g                                          | 70.000.0<br>00  | 35<br>orang                               | 350.000.00<br>0 | 40<br>oran<br>g                                          | 350000<br>000   | 40<br>orang                                      | 400.00<br>0.000 | 40<br>oran<br>g                                          | 400.000.<br>000 | 40<br>oran<br>g                                          | 1.570.00<br>0.000 |  |  |

|                          |                                    |                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                       |             |                                                                       |                 |                                                                                             |                   |                                                                          |                 |                                                         |                 |                                                         |                 |                                                         |                   |  |  |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
|                          |                                    | 2.16.0<br>2.2.01.<br>11 | Penguatan<br>Tata Kelola<br>Komisi<br>Informasi di<br>Daerah                                                                                        | Dukungan<br>administratif,<br>keuangan, dan<br>tata kelola komisi<br>informasi                        |             | tim<br>fasilitasi<br>sengketa<br>informasi<br>57<br>OPD               | 50.000.0<br>00  | tim<br>fasilitasi<br>sengketa<br>informasi<br>57<br>OPD                                     | 150.000.00<br>0   | tim<br>fasilitasi<br>sengketa<br>informasi<br>57<br>OPD                  | 150.000.<br>000 | tim<br>fasilitasi<br>sengketa<br>informasi<br>57<br>OPD | 150.00<br>0.000 | tim<br>fasilitasi<br>sengketa<br>informasi<br>57<br>OPD | 150.00<br>0.000 | tim<br>fasilitasi<br>sengketa<br>informasi<br>57<br>OPD | 650.000.<br>000   |  |  |
|                          |                                    | 2.16.0<br>2.2.01.<br>12 | Penyelenggaraan<br>Hubungan<br>Masyarakat,<br>Media dan<br>Kemitraan<br>Komunitas                                                                   | Rapat Koordinasi<br>Pemerintah<br>Daerah Dengan<br>Masyarakat,<br>Media dan<br>Kemitraan<br>Komunitas |             |                                                                       |                 |                                                                                             |                   | 4 Kali                                                                   | 100.000.<br>000 |                                                         |                 |                                                         |                 |                                                         | 100.000.<br>000   |  |  |
|                          |                                    | 2.16.0<br>2.2.01.<br>13 | Penyediaan/<br>Pengadaan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung<br>Informasi dan<br>Komunikasi<br>Publik<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Tersedianya Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Informasi dan<br>Komunikasi Publik                |             | 5<br>OPD,<br>1<br>bilboard,<br>1<br>unit<br>layanan<br>call<br>center | 225.000.<br>000 | 11<br>OPD, 1<br>Unit<br>Videotron,<br>1<br>bilboard,<br>1 unit<br>layanan<br>call<br>center | 1.700.000.0<br>00 | 11<br>OPD,<br>1<br>unit<br>layanan<br>call<br>center,<br>media<br>center | 600.000.<br>000 | 11<br>OPD, 1<br>unit<br>layanan<br>call<br>center       | 600.00<br>0.000 | 11<br>OPD,<br>1<br>unit<br>layanan<br>call<br>center    | 600.000.<br>000 | 11<br>OPD,<br>1<br>unit<br>layanan<br>call<br>center    | 3.725.00<br>0.000 |  |  |
| Meningkatkan<br>kualitas | Meningkatnya<br>pemanfaatan<br>TIK | 2.16.0<br>3             | <b>PROGRAM<br/>APLIKASI<br/>INFORMATIKA</b>                                                                                                         | Persentase<br>Perangkat Daerah<br>yang terkoneksi<br>dengan jaringan<br>fiber optik                   | 17.1<br>4 % | 25.7<br>1 %                                                           |                 | 34.29<br>%                                                                                  |                   | 48.<br>57<br>%                                                           |                 | 62.86<br>%                                              |                 | 77.1<br>4 %                                             |                 | 77.1<br>4 %                                             |                   |  |  |

|                                                                         |                                                       |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                       |  |              |  |              |  |              |  |              |  |              |  |              |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|---|--|--|
| penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui pemanfaatan TIK | dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik | 2.16.0<br>3.2.01        | <b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b> | Terlaksananya pengelolaan nama domain dan sistem jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah Kutai Timur |  |              |  |              |  |              |  |              |  |              |  |              |   |  |  |
|                                                                         |                                                       | 2.16.0<br>3.2.01.<br>01 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah Kabupaten                                                                                    | Jumlah SKPD yang punya Website                                                                        |  | semua<br>OPD |  | semua<br>OPD |  | semua<br>OPD |  | semua<br>OPD |  | semua<br>OPD |  | semua<br>OPD | 0 |  |  |
|                                                                         |                                                       | 2.16.0<br>3.2.01.<br>02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan                                                        | Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Sub Domain                                                    |  | semua<br>OPD |  | semua<br>OPD |  | semua<br>OPD |  | semua<br>OPD |  | semua<br>OPD |  | semua<br>OPD | 0 |  |  |

|  |  |                          |                                                                                                 |                                                                         |  |                                                  |                   |                                           |                   |                                                  |                   |                                           |                       |                                                  |                   |                                                  |                    |  |  |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--|--|
|  |  |                          | Pemerintah Daerah                                                                               |                                                                         |  |                                                  |                   |                                           |                   |                                                  |                   |                                           |                       |                                                  |                   |                                                  |                    |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>3.2.01.<br>03  | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                         | Tersedianya Koneksi antar OPD melalui Fiber Optik (FO)                  |  | 3<br>OPD                                         | 2.500.00<br>0.000 | 3 OPD                                     | 2.000.000.0<br>00 | 5<br>OPD                                         | 2.500.00<br>0.000 | 5 OPD                                     | 3.000.<br>000.00<br>0 | 5<br>OPD                                         | 3.000.00<br>0.000 | 5<br>OPD                                         | 13.000.0<br>00.000 |  |  |
|  |  | <b>2.16.0<br/>3.2.02</b> | <b>Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>                    | <b>Terwujudnya implementasi e-Government, SPBE dan Smart City</b>       |  |                                                  |                   |                                           |                   |                                                  |                   |                                           |                       |                                                  |                   |                                                  |                    |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>3.2.02.<br>01  | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Terlaksananya Pengelolaan dan pengawasan Pemerintahan secara elektronik |  | -<br>Sem<br>ua<br>OPD<br>dan<br>1<br>Doku<br>men |                   | -<br>Semua<br>OPD<br>dan 1<br>Dokum<br>en | 50.000.000        | -<br>Sem<br>ua<br>OPD<br>dan<br>1<br>Doku<br>men |                   | -<br>Semua<br>OPD<br>dan 1<br>Dokum<br>en | 50.000<br>.000        | -<br>Sem<br>ua<br>OPD<br>dan<br>1<br>Doku<br>men |                   | -<br>Sem<br>ua<br>OPD<br>dan<br>1<br>Doku<br>men | 100.000.<br>000    |  |  |

|  |  |                         |                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |                                                           |                   |                                               |                   |                                                           |                   |                                               |                       |                                                           |                   |                                                           |                    |  |  |
|--|--|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
|  |  | 2.16.0<br>3.2.02.<br>02 | Sinkronisasi<br>Pengelolaan<br>Rencana<br>Induk dan<br>Anggaran<br>Pemerintah<br>n Berbasis<br>Elektronik | Terlaksananya<br>monitoring dan<br>evaluasi<br>pengelolaan<br>rencana induk<br>dan anggaran<br>pemerintah<br>berbasis<br>elektronik |  | 1<br>doku<br>men                                          |                   | 1<br>Dokum<br>en                              |                   | 1<br>Doku<br>men                                          |                   | 1<br>Dokum<br>en                              |                       | 1<br>Doku<br>men                                          |                   | 1<br>Doku<br>men                                          |                    |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>3.2.02.<br>03 | Pengelolaan<br>Pusat Data<br>Pemerintah<br>Daerah                                                         | Jumlah OPD<br>Yang<br>menggunakan<br>Layanan Pusat<br>Data Pemerintah                                                               |  | 13<br>OPD<br>(300<br>Mbps)                                | 2.000.00<br>0.000 | 23<br>OPD                                     | 2.500.000.0<br>00 | 28<br>OPD                                                 | 2.850.00<br>0.000 | 31<br>OPD                                     | 2.900.<br>000.00<br>0 | 36<br>OPD                                                 | 3.000.00<br>0.000 | 36<br>OPD                                                 | 13.250.0<br>00.000 |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>3.2.02.<br>04 | Penyelenggar<br>aan Sistem<br>Komunikasi<br>Intra<br>Pemerintah<br>Daerah                                 | Tersedianya<br>perangkat<br>Jaringan<br>TIK/LAN/DC                                                                                  |  | 7<br>Pake<br>t<br>Pera<br>ngka<br>t<br>TIK/L<br>AN/D<br>C | 550.000.<br>000   | 7<br>Paket<br>Perang<br>kat<br>TIK/LA<br>N/DC | 1.500.000.0<br>00 | 7<br>Pake<br>t<br>Pera<br>ngka<br>t<br>TIK/L<br>AN/D<br>C | 1.300.00<br>0.000 | 7<br>Paket<br>Perang<br>kat<br>TIK/LA<br>N/DC | 1.150.<br>000.00<br>0 | 7<br>Pake<br>t<br>Pera<br>ngka<br>t<br>TIK/L<br>AN/D<br>C | 1.200.00<br>0.000 | 7<br>Pake<br>t<br>Pera<br>ngka<br>t<br>TIK/L<br>AN/D<br>C | 5.700.00<br>0.000  |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>3.2.02.<br>05 | Koordinasi<br>dan<br>Sinkronisasi<br>Sistem<br>Keamanan<br>Informasi                                      | Terlaksananya<br>koordinasi sistem<br>keamanan<br>informasi                                                                         |  | 5<br>Doku<br>men                                          | 150.000.<br>000   | 2<br>Dokum<br>en                              | 150.000.00<br>0   | 2<br>Doku<br>men                                          | 150.000.<br>000   | 2<br>Dokum<br>en                              | 150.00<br>0.000       | 2<br>Doku<br>men                                          | 150.000.<br>000   | 2<br>Doku<br>men                                          | 750.000.<br>000    |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>3.2.02.<br>06 | Koordinasi<br>dan<br>Sinkronisasi<br>Data dan<br>Informasi<br>Elektronik                                  | Terlaksananya<br>koordinasi<br>pengelolaan data<br>dan informasi<br>elektronik                                                      |  | 2<br>Doku<br>men                                          |                   | 2<br>Dokum<br>en                              | 50.000.000        |                                                           |                   |                                               |                       | 2<br>Doku<br>men                                          | 50.000.0<br>00    | 2<br>Doku<br>men                                          | 100.000.<br>000    |  |  |

|  |  |                         |                                                                               |                                                                                                         |  |                             |             |                               |             |                             |             |                                 |             |                                 |             |                               |               |  |  |
|--|--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|--|--|
|  |  | 2.16.0<br>3.2.02.<br>07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik      | - Jumlah layanan Publik yang terintegrasi<br>- Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online |  | 2 aplikasi 3 layanan publik | 50.000.000  | 2 aplikasi - 3 layanan publik | 250.000.000 | 2 aplikasi 5 layanan publik | 200.000.000 | - 2 aplikasi - 5 layanan publik | 200.000.000 | - 2 aplikasi - 5 layanan publik | 200.000.000 | - 2 aplikasi 5 layanan publik | 900.000.000   |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>3.2.02.<br>09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Inovasi yang mendukung Smart City                      |  | 3 OPD                       | 100.000.000 | 3 OPD                         | 150.000.000 | 3 OPD                       | 150.000.000 | 3 OPD                           | 150.000.000 | 3 OPD                           | 150.000.000 | 3 OPD                         | 700.000.000   |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>3.2.02.<br>11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)                       | Tersedianya Command Center                                                                              |  | Pusat Informasi             |             | 1 unit command center         | 750.000.000 | 1 unit command center       | 100.000.000 | 1 unit command center           | 100.000.000 | 1 unit command center           | 100.000.000 | 1 unit command center         | 1.050.000.000 |  |  |
|  |  | 2.16.0<br>3.2.02.<br>12 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE                | Tersedianya laporan monev pengembangan ekosistem SPBE                                                   |  | 1 Dokumen                   | 75.000.000  | 1 Dokumen                     | 100.000.000 | 1 Dokumen                   | 100.000.000 | 1 Dokumen                       | 100.000.000 | 1 Dokumen                       | 75.000.000  | 1 Dokumen                     | 450.000.000   |  |  |

|                                                                                                                                 |                                                              |                 |                                                                              |                                                             |         |                                                 |               |                                                 |               |                                                 |               |                                                  |               |                                                  |               |                                                  |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|--|
| Menyediakan dukungan infrastruktur TIK secara merata dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi | Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi |                 | <b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>                                          | Cakupan Layanan Telekomunikasi                              | 73.76 % | 77.37 %                                         |               | 80.48 %                                         |               | 83.17 %                                         |               | 85.48 %                                          |               | 87.48 %                                          |               | 87.48 %                                          |                |  |
|                                                                                                                                 |                                                              |                 | <b>Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b> | Jumlah Pemanfaatan Infrastruktur TIK untuk pelayanan publik |         | 62 titik                                        |               | 77 titik                                        |               | 97 titik                                        |               | 117 titik                                        |               | 141 titik                                        |               | 141 titik                                        |                |  |
|                                                                                                                                 |                                                              | 2.16.03.2.02.08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah                         | Tersedianya Infrastruktur TIK                               |         | 62 titik internet desa, 3 WIFI, 2 CCTV, 2 tower | 1.000.000.000 | 77 titik internet desa, 3 WIFI, 2 CCTV, 2 tower | 5.800.000.000 | 97 titik internet desa, 3 WIFI, 2 CCTV, 2 tower | 5.850.000.000 | 117 titik internet desa, 3 WIFI, 2 CCTV, 2 tower | 5.900.000.000 | 141 titik internet desa, 3 WIFI, 2 CCTV, 2 tower | 4.875.000.000 | 141 titik internet desa, 3 WIFI, 2 CCTV, 2 tower | 23.425.000.000 |  |



|                                                                                               |                                                                                    |                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                             |     |                     |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|--|--|
|                                                                                               |                                                                                    | 2.16.0<br>3.2.02.<br>10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | - Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dan profesionalisme SDM TIK masyarakat dan aparatur - Penyusunan Rencana Pengembangan TIK |     | 2 kali<br>1 dokumen | 100.000.000 | 5 kali<br>(35 orang) | 750.000.000 | 5 kali<br>(40 orang) | 700.000.000 | 5 kali<br>(40 orang) | 800.000.000 | 5 kali<br>(40 orang) | 500.000.000 | 5 kali<br>(40 orang) | 2.850.000.000 |  |  |
| Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui pemanfaatan TIK | Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik | 2.20.02                 | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>                                             | <b>Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi</b>                                                                                                              | ada | ada                 |             | ada                  |             | ada                  |             | ada                  |             | ada                  |             | ada                  |               |  |  |
|                                                                                               |                                                                                    | 2.20.02.01              | <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                    | Persentase OPD yang Menyediakan data statistik sektoral                                                                                                                     |     | 40%                 |             | 60%                  |             | 70%                  |             | 80%                  |             | 100%                 |             | 100%                 |               |  |  |

|  |  |                         |                                                                                                       |                                                                                                            |  |              |             |               |             |               |             |               |             |               |             |               |               |  |  |
|--|--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--|--|
|  |  | 2.20.0<br>2.2.01.<br>01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral  | Persentase OPD yang Menyediakan data statistik sektoral                                                    |  | 40%          | 150.000.000 | 60%           | 175.000.000 | 70%           | 175.000.000 | 80%           | 175.000.000 | 100%          | 200.000.000 | 100%          | 875.000.000   |  |  |
|  |  | 2.20.0<br>2.2.01.<br>02 | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah OPD yang terintegrasi dalam portal satu data Jumlah peserta diklat/bimtek peningkatan SDM Statistik |  | 8 OPD 50 org | 200.000.000 | 10 OPD 10 org | 300.000.000 | 10 OPD 50 org | 350.000.000 | 10 OPD 10 org | 310.000.000 | 10 OPD 50 org | 300.000.000 | 10 OPD 50 org | 1.460.000.000 |  |  |
|  |  | 2.20.0<br>2.2.01.<br>03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral                                                                 | Tersusunnya metadata statistik sektoral daerah                                                             |  |              |             | 1 buah        | 250.000.000 | 1 buah        | 250.000.000 | 1 buah        | 150.000.000 | 1 buah        | 250.000.000 | 1 buah        | 900.000.000   |  |  |
|  |  | 2.20.0<br>2.2.01.<br>04 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                                  | penguatan kelembagaan forum satu data kabupaten Kutai Timur                                                |  | 6 kali       | 250.000.000 | 6 kali        | 350.000.000 | 6 kali        | 350.000.000 | 6 kali        | 350.000.000 | 6 kali        | 300.000.000 | 6 kali        | 1.600.000.000 |  |  |

|  |  |                         |                                                                                                     |                                                                                           |  |                  |                 |                  |                 |          |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                   |  |  |
|--|--|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|--|--|
|  |  | 2.20.0<br>2.2.01.<br>05 | Pengembang<br>an<br>Infrastruktur                                                                   | pengembangan<br>portal satu data<br>setiap tahun                                          |  | 1<br>web         | 250.000.<br>000 | 1 web            | 250.000.00<br>0 | 1<br>web | 250.000.<br>000 | 1 web            | 250.00<br>0.000 | 1<br>web         | 250.000.<br>000 | 1<br>web         | 1.250.00<br>0.000 |  |  |
|  |  | 2.20.0<br>2.2.01.<br>06 | Penyelenggar<br>aan Otorisasi<br>Statistik<br>Sektoral di<br>Daerah                                 | Jumlah Dokumen<br>pendukung<br>penyelenggaraan<br>statistik sektoral                      |  | 1<br>doku<br>men | 50.000.0<br>00  | 2<br>dokum<br>en | 150.000.00<br>0 |          |                 | 2<br>dokum<br>en | 150.00<br>0.000 | 2<br>doku<br>men | 100.000.<br>000 | 2<br>doku<br>men | 450.000.<br>000   |  |  |
|  |  | 2.21.0<br>2             | <b>PROGRAM<br/>PENYELENG<br/>GARAAN<br/>PERSANDIA<br/>N UNTUK<br/>PENGAMAN<br/>AN<br/>INFORMASI</b> | <b>Terselenggarany<br/>a urusan<br/>persandian<br/>untuk<br/>pengamanan<br/>informasi</b> |  |                  |                 |                  |                 |          |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                   |  |  |

|  |  |                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |  |                  |                 |            |                 |                  |                 |             |                 |                  |                 |                  |                 |  |  |
|--|--|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|--|
|  |  | 2.21.0<br>2.2.01        | Penyelengga<br>raan<br>Persandian<br>untuk<br>Pengamana<br>n Informasi<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/K<br>ota                              | Persentase OPD<br>yang<br>menggunakan<br>sistem jaringan<br>komunikasi<br>sandi                                                                                                  |  | 25%              |                 | 35%        |                 | 45%              |                 | 60%         |                 | 80%              |                 | 80%              |                 |  |  |
|  |  | 2.21.0<br>2.2.01.<br>01 | Penetapan<br>Kebijakan<br>Tata Kelola<br>Keamanan<br>Informasi dan<br>Jaring<br>Komunikasi<br>Sandi<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/K<br>ota | Tersedianya<br>Kebijakan Tata<br>kelola keamanan<br>inforsi dan jaring<br>komunikasi sandi                                                                                       |  | 2<br>Doku<br>men | 150.000.<br>000 |            |                 | 2<br>Doku<br>men | 150.000.<br>000 |             |                 | 2<br>Doku<br>men | 150.000.<br>000 | 2<br>Doku<br>men | 450.000.<br>000 |  |  |
|  |  | 2.21.0<br>2.2.01.<br>02 | Pelaksanaan<br>Analisis<br>Kebutuhan<br>dan<br>Pengelolaan<br>Sumber Daya<br>Keamanan<br>Informasi<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/K<br>ota  | Tersedianya<br>dokumen<br>perencanaan/<br>Kajian analisis<br>Persandian dan<br>Keamanan<br>Informasi -<br>Jumlah Aparatus<br>yang mengikuti<br>BIMTEK<br>Pengamanan<br>Informasi |  | 1<br>doku<br>men |                 | 7<br>orang | 150.000.00<br>0 | 10<br>oran<br>g  | 200.000.<br>000 | 10<br>orang | 200.00<br>0.000 | 10<br>oran<br>g  | 200.000.<br>000 | 10<br>oran<br>g  | 750.000.<br>000 |  |  |

|  |  |                         |                                                                                                                                      |                                                                  |  |                          |                    |                       |                    |                          |                    |                       |                        |                          |                    |                          |                   |  |  |
|--|--|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
|  |  | 2.21.0<br>2.2.01.<br>03 | Pelaksanaan<br>Keamanan<br>Informasi<br>Pemerintah<br>n Daerah<br>Kabupaten/K<br>ota Berbasis<br>Elektronik<br>dan Non<br>Elektronik | Terlaksananya<br>pengamanan<br>informasi<br>Pemerintah<br>daerah |  | 3<br>layan<br>an         | 150.000.<br>000    | 3<br>layana<br>n      | 350.000.00<br>0    | 3<br>laya<br>nan         | 350.000.<br>000    | 3<br>layana<br>n      | 350.00<br>0.000        | 3<br>layan<br>an         | 350.000.<br>000    | 3<br>layan<br>an         | 1.550.00<br>0.000 |  |  |
|  |  | 2.21.0<br>2.2.01.<br>04 | Penyediaan<br>Layanan<br>Keamanan<br>Informasi<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/K<br>ota                                         | Tersedianya<br>layanan<br>keamanan<br>informasi                  |  | 1<br>pake<br>t           | 150.000.<br>000    | 1 paket               | 250.000.00<br>0    | 1<br>pake<br>t           | 150.000.<br>000    | 1 paket               | 250.00<br>0.000        | 1<br>pake<br>t           | 150.000.<br>000    | 1<br>pake<br>t           | 950.000.<br>000   |  |  |
|  |  | 2.21.0<br>2.2.02        | <b>Penetapan<br/>Pola<br/>Hubungan<br/>Komunikasi<br/>Sandi Antar<br/>Perangkat<br/>Daerah<br/>Kabupaten/K<br/>ota</b>               |                                                                  |  |                          |                    |                       |                    |                          |                    |                       |                        |                          |                    |                          |                   |  |  |
|  |  | 2.21.0<br>2.2.02.<br>01 | Operasionalis<br>asi Jaring<br>Komunikasi<br>Sandi<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/K<br>ota                                     | Tersedianya<br>jaring Komunikasi<br>Sandi Pemerintah<br>Daerah   |  | 6<br>OPD<br>dan<br>6 org |                    | 6 OPD<br>dan 6<br>org | 100.000.00<br>0    | 6<br>OPD<br>dan<br>6 org | 100.000.<br>000    | 6 OPD<br>dan 6<br>org | 100.00<br>0.000        | 6<br>OPD<br>dan<br>6 org | 200.000.<br>000    | 6<br>OPD<br>dan<br>6 org | 500.000.<br>000   |  |  |
|  |  |                         |                                                                                                                                      |                                                                  |  |                          | 18.189.6<br>35.160 |                       | 31.825.000.<br>000 |                          | 31.775.0<br>00.000 |                       | 33.485<br>.000.0<br>00 |                          | 33.050.0<br>00.000 |                          |                   |  |  |









## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja yang baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditujukan dengan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur yang secara langsung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.28  
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur  
yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

| No  | Indiaktor                                                               | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target capaian setiap Tahun |         |         |         |         | Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------|
|     |                                                                         | Tahun 0                                 | Tahun 1                     | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |                                          |
| (1) | (2)                                                                     | (3)                                     | (4)                         | (5)     | (6)     | (7)     | (8)     | (9)                                      |
| 1   | Cakupan Layanan Telekomunikasi                                          | 73.76                                   | 77.37                       | 80.48   | 83.17   | 85.48   | 87.48   | 87.48                                    |
| 2   | Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik | 17.14                                   | 25.71                       | 34.29   | 48.57   | 62.86   | 77.14   | 77.14                                    |
| 3   | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi                 | ada                                     | ada                         | ada     | ada     | ada     | ada     | ada                                      |
|     |                                                                         |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
|     |                                                                         |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
|     |                                                                         |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
|     |                                                                         |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
|     |                                                                         |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |
|     |                                                                         |                                         |                             |         |         |         |         |                                          |



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis OPD merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan/ isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian tujuan organisasi. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, merupakan rencana tindak seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Renstra OPD juga menjadi pedoman dan rujukan bagi jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat di bidang komunikasi, informatika, Persandian dan Statistik. Sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Kutai Timur, penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur merujuk dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Komitmen seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi dalam pelaksanaan tugas menjadi hal yang harus dilaksanakan. Diharapkan dengan evaluasi yang terus berjalan secara sistematis, seluruh jajaran Diskominfo Perstatik dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Diskominfo Perstatik Kabupaten Kutai Timur merupakan aset berharga yang berperan dalam memajukan dan meningkatkan daya saing daerah.

Kegiatan, sub kegiatan, indikator, target kinerja, dan pagu anggaran yang disusun masih dalam bentuk bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan selain penjabaran dari renstra juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan dari RPJMD.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance menuju terwujudnya Kabupaten Kutai Timur Tercinta yang akan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Sangatta, 2021  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,  
Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur,

**Ery Mulyadi, SP., MM.**  
Nip. 19770427 200112 1 003